

LEMBAR PENGAJUAN**PERAN ELIT POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(PKB) DALAM MENINGKATKAN MUTU MADRASAH
DI KOTA MALANG****SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh*

Gelar

Sarjana PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S. Pdi)

Oleh:

IBRAHIM ISA

NIM : 03140023



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008
HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN ELIT POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(PKB) DALAM MENINGKATKAN MUTU MADRASAH
DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

**IBRAHIM ISA
NIM: 03140023**

Disetujui,

Dosen Pembimbing

Mohammad Walid, M. A.
NIP. 150310896

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. Moh. Padil, M.PdI
NIP. 150 267 235
HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN ELIT POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(PKB) DALAM MENINGKATKAN MUTU MADRASAH
DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ibrahim Isa (03140023)

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal
15 April 2008 dengan nilai B+

Dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana MADRASAH (S.Pd.I)

PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Mohammad Walid, M. A.
NIP. 150310896

Penguji Utama,

Marno, M. Ag
NIP. 150321639

Pembimbing,

Drs. H. Suaib H. Muhammad M. Ag
NIP. 150042031

Mohammad Walid, M. A.
NIP. 150310896

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang**

Prof. Dr. H. M. Djunaidi Ghony
NIP. 150 042 031

PERSEMBAHAN

*Karya ini
Aku Persembahkan untuk;*

Sepasang Mutiara Hati, Ayahanda dan Ibunda

Yang selalu memancarkan sinar kasih dan sayang

Yang tak pernah usai dalam mengayomi, mendidik, mendoakan dan mengasihi

Serta membiayaiiku dengan setulus hati

Pembimbing, Guru dan Dosenku

Yang selalu menjadi pelita dalam studiku

Karena engkau, aku dapat mewujudkan harapan dan anganku

Sebagai awal untuk mencapai cita-cita dan cinta.

Saudaraku

Adikku tercinta (Abd Rahman) yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan doa dengan ketulusan hati.

(Aku sayang kamu)

Seseorang Yang Mempunyai Arti Tersendiri Dalam Hidupku

Istriku (Ani Hidayah S. Pd. I), yang selalu memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang, motivasi dan do'a dengan ketulusan hati.

(I Love U)

Sahabat-sahabatku di kos

Sihab, Irul, Adie, Baihaki, Mukhlis, A'la, Isni, Ani', Mufid, Faiz, Imron, Kanto, Feri.

Sahabat-sahabatku di Kampus

Abdul Qadir Qudus, Makmun, Mas Lutfi, Hadami, Pardik,

Sahabat-sahabatku di PMII

Hamdani, Hasan/Nurul, Kholid,

Yang selalu memberikan motivasi dan dukungan

Terimakasih atas semua kebaikan kalian semoga Allah membalasnya.

Amien.

MOTTO

(11:)

Allah SWT. akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat (QS. al-Mujadalah : 11)



Muhammad Walid, M.A.
Dosen Pembimbing
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Maret 2008
Lamp. : 4 (empat) Eksemplar

Malang, 20

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang
di-

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ibrahim Isa

NIM : 03140023

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang

maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Muhammad Walid, M.A.
NIP. 150310896

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 08 April

2008

IBRAHIM ISA
NIM: 03140023

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat kesehatan, keimanan dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul: **“Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang ”**. Tak lupa Sholawat serta salam saya semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman gelap gulita (jahiliyah) menuju zaman yang penuh dengan cahaya (Dinnul Islam).

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sehingga dapat memperbaiki/menyempurnakan skripsi ini.

Dengan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan saya dan memberikan kasih sayang dan dorongan baik moril maupun materiil hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, beserta segenap Dosen dan Karyawan yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan dikampus ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Djunaidi Ghony, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
4. Bapak Drs. Moh. Padil, M.Pd.I, selaku ketua jurusan MADRASAH Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
5. Bapak Muhammad Walid, M.A, selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan perhatian, bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Keluarga Besar DPC PKB di Kota Malang, yang telah sudi menerima saya dalam proses penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar MI Sunan Kalijaga dan MTs Sunan Kalijaga di Malang, yang telah sudi menerima saya dalam proses penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap teman-teman yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini.

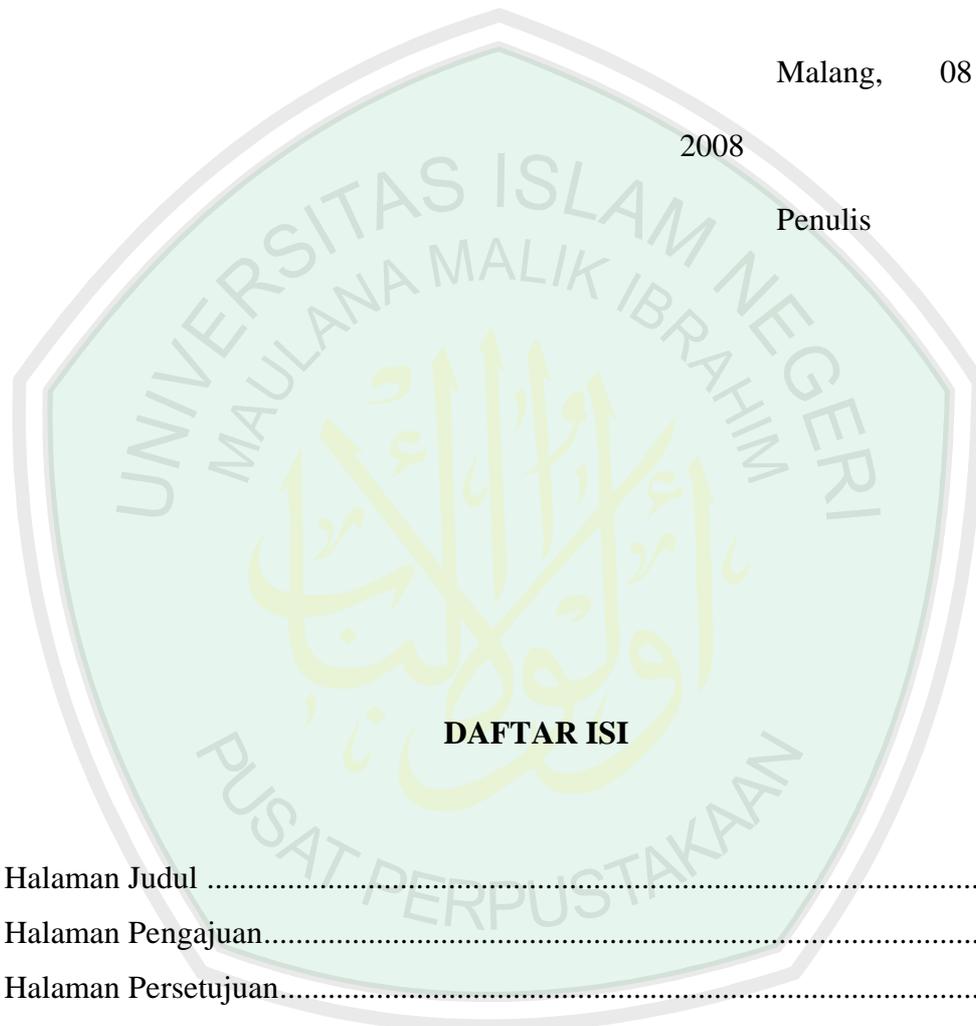
Penulis sadar sepenuhnya tidak dapat membalas atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun pengkaji terutama bagi penulis sendiri. Insya Allah Amiin.

Malang, 08 April

2008

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Motto	vi
Halaman Nota Dinas	vii
Halaman Pernyataan.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiii

Halaman Abstrak	xiv
-----------------------	-----

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Ruang Lingkup Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Partai Politik.....	8
1. Pengertian Partai Politik.....	8
2. Pengertian Elit Politik	12
3. Fungsi dan Tujuan Partai Politik.....	13
4. Tugas dan Tanggung Jawab Partai Politik	18
B. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.....	18
1. Pengertian Mutu Pendidikan.....	18
2. Pengertian PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	20
3. Tujuan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	23
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	25
C. Peran Elit Politik Dalam Meningkatkan Mutu PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	29

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Peneltian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Kehadiran Peneliti dan Informan Penelitian	38
E. Prosedur Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data.....	43
F. Metode Analisis Data.....	44

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46
-----------------------------------	----

BAB : IV : PENYAJIAN DATA

A. Langkah yang dilakukan Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang	49
B. Latar belakang peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.....	53
C. Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.....	54

BAB V : ANALISIS DATA

A. Langkah yang dilakukan Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang	58
B. Latar belakang peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.....	68
C. Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.....	73

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penelitian.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dari DPC PKB Kota Malang
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian dari MI. dan MTs. Sunan Kalijogo
- Lampiran 4 : Pedoman Interview
- Lampiran 5 : Bukti Konsultasi Dosen Pembimbing.



ABSTRAK

Isa, Ibrahim. *Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Muhammad Walid, M.A.

Problematika pendidikan nasional di negara kita sampai saat ini masih sangat pelik untuk diatasi terutama dari segi peningkatan mutu kualitasnya. Pemerintahpun sebagai institusi yang seharusnya bertanggung jawab untuk memformat sebuah sistem pendidikan yang mencerdaskan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang menerangkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya institusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sampai saat ini masih belum bisa menciptakan suatu format pendidikan yang mencerdaskan sumber daya manusia sekaligus suatu sistem pendidikan yang bisa menanamkan konsep-konsep pencerahan, kepekaan sosial serta rasa memiliki terhadap tanah air.

Oleh karena itu elit politik sebagai pemegang kebijakan memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, bisa muncul disebabkan berbagai hal: *Pertama*, karena kepentingan partai politik yang telah dibakukan. *Kedua*, karena adanya kepentingan pribadi. *Ketiga*, karena pengaruh politik yang mengedepankan kepentingan reformasi politik. *Keempat*, karena keyakinan agamanya. *Kelima*, karena pengaruh tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Masing-masing memiliki kekuatan untuk mendominasi pemikiran elit politik. Namun demikian, elit politik di dalam mengedepankan pemikiran tentang elit politiknya, kemungkinan melalui pertimbangan intuisi atau rasionya. Pertimbangan elit politik melalui intuisi adalah pertimbangan dengan memperhatikan suara hati yang merupakan suara tuhan, sedangkan melalui pertimbangan akal, maka logis seseorang elit politiklah yang benar. Namun adakah dibalik kemajemukan itu yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan Islam di Madrasah dikalangan para elit politik dan mampu memberikan pandangan terhadap mutu pendidikan pada warga kota Malang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka skripsi ini akan mengkaji tentang "*Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang*" dan masalah yang diteliti adalah: 1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang, 2. Apa yang melatarbelakangi Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Madrasah Kota Malang, 3. Bagaimana peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.

Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara (interview), dokumentasi. Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh data-data yang kongkrit yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang dilaksanakan di Kantor Fraksi PKB DPRD kota Malang. Untuk pengecekan data maka peneliti menghadirkan Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijaga Malang dan Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijaga Malang

sebagai contoh. Setelah data terkumpul kemudian di analisa melalui metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut: *Pertama:* Langkah-Langkah Elit Politik PKB kota Malang dalam meningkatkan Mutu Madrasah yaitu dengan cara selalu memberikan pendampingan kepada setiap instansi pendidikan, memperjuangkan kesejahteraan para guru, pengadaan fasilitas sekolah, memberikan beasiswa kepada anak didik. Sekalipun bukan atas nama partai politik, tetapi sekurang-kurangnya mereka memberikan apresiasi yang positif guna untuk mengembangkan Mutu Madrasah di kota Malang. *Kedua:* Kepedulian dan keperihatinan merekalah yang melatarbelakangi mereka harus benar-benar berjuang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya dalam peningkatan Mutu Madrasah kota Malang. Sekaligus teropsesi oleh jargon Malang sebagai kota pendidikan go internasional, dan. *Ketiga:* Elit Politik PKB yang saat ini duduk di kursi legislatif (DPRD) tidak secara langsung memberikan satu kontribusi secara *face to face*, apalagi harus membawa kendaraan organisasi, tetapi mereka hanya bisa memperjuangkan kalau instansi pendidikan memberikan informasi dan keluhan terkait dengan pengembangan mutu pendidikan di Madrasah, para elit politik PKB kota Malang akan memperjuangkan dengan semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya yang menjadi penentu dalam hal kebijakan tersebut semuanya tergantung pada sidang dewan.

Kata Kunci: Elit Politik , Mutu Madrasah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Elit politik dalam pengertian khusus adalah individu atau kelompok orang yang mengendalikan organisasi politik dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan dalam pengertian umum adalah individu atau kelompok yang mengendalikan dan menentukan arah kebijakan organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan dan keagamaan (Madrasah). Elit politik dalam mengendalikan organisasi ini selalu menggunakan patokan-patokan tertentu. Patokan-patokan yang nantinya disebut dengan kebijakan. Elit politik memiliki berbagai dimensi, baik tujuan, sarana dan aksi politik. Elit politik tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan kader partai namun juga harus meningkatkan Mutu Madrasah dan berhubungan dengan praktek institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik dan ekonomi.

Elit politik sangat luas cakupannya dalam meningkatkan Mutu pendidikan, dengan demikian peneliti membatasi hanya pada aksi politik peningkatan Mutu Madrasah di kota Malang. Dalam dimensi ini pelaku memegang peranan, sebagai yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari peningkatan Mutu pendidikan. Peningkatan Mutu pendidikan memiliki orientasi situasi dan paham permasalahan ini mengandalkan kemampuan mempersepsi kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan peta kekuatan politik yang ada.

Disposisi kekuatan ini membantu untuk memperhitungkan kemampuan dan dampak aksi politiknya.

Oleh karena itu elit politik, sebagai pemegang kebijakan mempunyai makna dalam meningkatkan Mutu pendidikan, bisa muncul disebabkan berbagai hal: *Pertama*, karena kepentingan partai politik yang telah di bakukan. *Kedua*, karena adanya kepentingan pribadi. *Ketiga*, karena pengaruh politik yang mengedepankan kepentingan reformasi politik. *Keempat*, karena keyakinan agamanya. *Kelima*, karena pengaruh tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Masing-masing memiliki kekuatan untuk mendominasi pemikiran elit politik. Namun demikian, elit politik di dalam mengedepankan pemikiran tentang elit politiknya, kemungkinan melalui pertimbangan intuisi atau rasionya. Pertimbangan elit politik melalui intuisi adalah pertimbangan dengan memperhatikan suara hati yang merupakan suara tuhan, sedangkan melalui pertimbangan akal, maka logis seseorang elit politiklah yang benar.

Dalam Negara demokrasi atau Negara otoriter, partai politik melaksanakan fungsi sosialisasi politik, rekrutmen anggota dan pendukung politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, mengendalikan konflik dan lain-lain. Dengan fungsi-fungsi itu partai politik berusaha untuk berebut masa dan pengaruh di tengah-tengah masyarakat agar menjadi partai yang besar, melalui berbagai cara, adakalanya melakukan tindakan dan cara-cara yang indah yang membuat masyarakat simpati namun juga adakalanya dengan menghalalkan segala cara asalkan tujuan partai dapat tercapai, bahkan kepentingan individu pun ikut bermain dengan menginjak teman sendiri agar tercapai kepentingan individu

tersebut. Bukankah dalam politik tidak dikenal teman abadi atau musuh abadi yang ada hanyalah kepentingan abadi. Demikian pula di kota Malang sebagai kota yang majemuk dalam segala hal termasuk majemuk dalam pandangan dan pilihan politik dan partai politiknya, pasti cara mereka berfikir dan bertindak juga majemuk. Di sinilah elit politik dalam meningkatkan Mutu pendidikan politik warga dan anggotanya. Namun adakah dibalik kemajemukan itu yang bertujuan meningkatkan Mutu Madrasah dikalangan para elit politik dan mampu memberikan pandangan terhadap Mutu pendidikan pada warga kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari masalah tersebut di atas, penulis akan merumuskan masalah yang menjadi dasar pokok pembahasan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang?
2. Apa yang melatarbelakangi elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah Kota Malang?
3. Bagaimana peran elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui peran elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis menyelesaikan penelitian tentang Peran Elit Politik Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang maka penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi peneliti
 - a. Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti.
 - b. Penelitian dapat memberikan wawasan yang luas sehingga peneliti dapat tanggap terhadap Mutu pendidikan
2. Bagi Partai Politik.
 - a. Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi partai politik dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas sehingga partai politik dapat tanggap terhadap Mutu Madrasah di kota Malang.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat merasakan peran partai politik dalam dunia Madrasah

4. Bagi UIN Malang

Sebagai tambahan khazanah ilmiah bagi perpustakaan (sebagai referensi dan sebagai penambah pembendaharaan perpustakaan Fakultas Tarbiyah jurusan PAI)

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar pembahasan dalam skripsi tidak terlalu luas, serta untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bentuk-bentuk peran elit politik dalam meningkatkan Mutu Madrasah di madrasah kota Malang.
2. Tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh elit politik dalam meningkatkan Mutu Madrasah di madrasah kota Malang.
3. Tentang kebijakan yang dicetuskan oleh elit politik dalam meningkatkan Mutu Madrasah di madrasah kota Malang.
4. Bentuk-bentuk yang melatarbelakangi ilmu politik dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka pembahasan ini di bagi menjadi enam bab. Uraian masing-masing bab ini disusun sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar informasi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian masalah, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisikan tentang kajian yang terdiri dari: Pembahasan tentang konsep elit politik, tentang fungsi elit politik, tentang tugas dan tanggung jawab elit politik, tentang konsep Mutu pendidikan, tentang pengertian pendidikan, tentang bentuk-bentuk pendidikan, tentang faktor-fakator yang mempengaruhi peningkatan Mutu pendidikan, tentang peran elit politik dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang, tentang peran elit politik dalam menungkatkan Mutu pendidikan.

BAB III: Berisikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari: lokasi penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian dan informan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan, metode analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Merupakan pembahasan tentang laporan hasil penelitian tentang Penyajian data meliputi Bagaimana peran elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang, Apa yang melatarbelakangi elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.

BAB V: Merupakan analisis data tentang : Langkah-langkah yang dilakukan oleh elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang, Yang melatarbelakangi elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang dan peran elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang

BAB VI : Merupakan bab penutup. Pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Partai Politik.

1. Pengertian Partai Politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Dibawah ini ada beberapa definisi mengenai tentang partai politik:

- a. Carl J. Friedrich: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.
- b. R. H. Soltau: Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kebijaksanaan umum mereka.
- c. Sigmund Neumann, dalam buku karangannya model politikal parties mengemukakan definisi sebagai berikut: partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan

sesuatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Perlu diterangkan bahwa partai politik berbeda dengan gerakan. Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali dengan cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik gerakan mempunyai tujuan yang lebih fundamental sifatnya dan kadang-kadang malah bersifat ideologi. orientasi ini merupakan ikatan yang kuat. Berbeda dengan partai politik, gerakan sering tidak mengadakan nasib dalam pemilihan umum.¹

Masih menurut bukunya Prof. Miriam bahwa politik adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.

Politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas: a. Tujuan dan kegiatan politik. b. cara-cara mencapai tujuan itu. c. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu. d. Kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain: masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-

¹ Miriam Badiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) Hal. 161-162.

lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam bukunya *The Study Of Political Theory* dibedakan menjadi dua macam teori politik, sekalipun perbedaan kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak, yaitu adalah:

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai-nilai, maka teori-teori ini boleh dinamakan *valnational* (mengandung nilai), yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempertahankan norma-norma atau nilai-nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan *nonvaluation*, ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Teori politik yang mempunyai dasar moral fungsinya yaitu menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan yang sesuai norma-norma moral. Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini. Dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga disatu pihak memberi kepuasan perorangan dan pihak lain dapat membimbingnya menuju kesatuan struktur masyarakat politik yang stabil dan dinamis. Untuk keperluan itu teori-teori politik

semacam ini memperjuangkan suatu tujuan yang bersifat moral dan atas dasar itu menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik. Fungsi utama teori politik ini ialah mendidik warga masyarakat mengenai norma-norma dan nilai-nilai ini.²

Pendefinisian ilmu politik dapat digolongkan menjadi 3 bagian diantaranya adalah:

1. Pendefinisian secara institusionil, merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang menyelidiki lembaga-lembaga politik seperti negara, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lain-lain. Umpamanya Wilbur White merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari asal usul, bentuk-bentuk dan proses negara dan pemerintah. Gilchrist merumuskan ilmu politik sebagai ilmu negara dan pemerintah.
2. Pendefinisian secara fungsional, pendefinisian ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap pendefinisian institusionil yang terlalu menitik beratkan pada struktur formal lembaga-lembaga politik dengan peninjauannya yang terlalu dogmatis yuridis yang terlalu menitik beratkan kepada dokumen-dokumen hukum daripada kenyataan sosio-politis. Pendefinisian secara fungsional berusaha melepaskan diri pada dogmatisme dan sifat yuridis sepihak daripada pendefinisian institusionil itu. Fungsionalisme lebih mengutamakan fungsi dan aktifitas daripada struktur formal dari lembaga-lembaga politik yang diselidiki. Fungsionalisme meninjau lembaga-lembaga politik tidak sebagai lembaga-lembaga yang terasing dan terbebas dari pengaruh faktor-faktor

². *Ibid.*, hal. 30-31

kekuasaan riil. Lembaga-lembaga politik ditinjau sebagai sesuatu yang dinamis yang tidak luput dari pengaruh faktor-faktor yang non yuridis. Oleh karena itu lembaga-lembaga politik diperuntukkan bagi manusia, maka lembaga itu harus bermanfaat bagi manusia.

3. Pendefinisian secara hakekat politik, para sarjana sependapat dengan jawaban diatas, yakni hakekat politik adalah kekuasaan dan dengan begitu proses politik adalah serentetan dengan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau tehnik menjalankan kekuasaan-kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan. Pendefinisian ilmu politik berdasarkan hakekat politik sebagai kekuasaan disebut juga interpretasi dari politik berdasarkan kekuasaan. Kekuasaan yang diselidiki itu diperhatikan sifatnya, asanya, perkembangannya, rangka dan akibatnya.³

2. Pengertian Elit Politik.

Elit politik dalam kamus ilmiah populer adalah golongan orang terpelajar / terpandang : orang yang terpilih / terpandang dalam masyarakat.⁴

Menurut Kuntowijoyo, jika pada masa pera kemerdekaan kaum priyayi dapat memiliki kedudukan dan peranan sebagai abdi dalem dan ambtenaar, kini muncul priyayi baru yaitu para pegawai negara yang disebut sebagai elit birokrasi, elit birokrasi bahkan banyak terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis.

³. F. Isjwara S. H L. L. M, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Putra Bardin, 1999), hal. 38-

⁴. Pius. A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1999), hal. 144.

Struktur perilaku sosial atau tindakan sosial yang dikaji dalam hubungan dengan study tentang elit terkait dengan sektor kepribadian struktur sosial dan struktur hubungan yang melingkupi kehidupan para elit menjadi bagian dari wilayah kajian sosiologi politik, terutama menyangkut the study of political elit and masses. Dalam sosiologi politik, teori tentang elit dikembangkan dalam kaitan perjuangan politik untuk meraih posisi utama dari persaingan kekuasaan.

Dalam pandangan Keller, study tentang elit dapat memusatkan perhatian pada empat hal: *Pertama*, anatomi elit berkenaan dengan siapa, berapa banyak dan bagaimana para elit muncul. *Kedua*, fungsi elit berkenaan dengan apa tanggung jawab sosial elit. *Ketiga*, pembinaan elit menyangkut tentang siapa yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi elit, imbalan apa yang mereka terima dan kewajiban-kewajiban apa dan kenapa para elit itu bertahan, serta bagaimana dan kenapa diantara mereka hancur dan tidak dapat bertahan.⁵

3. Fungsi dan Tujuan Partai Politik.

Dalam negara demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

- a. Partai sebagai sarana komunikasi politik: Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas. Dilain pihak partai politik berfungsi juga untuk membicarakan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan

⁵. Zulfi Mubarak, *Konspirasi Politik elit Tradisional di Era Reformasi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hal. 57.

pemerintah, dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas kebawah dan dari bawah keatas, dimana partai memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa idee-idee. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

- b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik: Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik. Didalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap phenomina politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui dimana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi kegenerasi selanjutnya dalam hubungan ini partai politik sebagai salah satu sarana sosialisasi politik dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai politik menciptakan "image" bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum disamping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga mendidik menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan dinegara-negara baru partai politik juga berperan untuk memupuk

identitas dan integrasi nasional. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya.

- c. Partai sebagai sarana rekrutmen politik : partai politik juga berfungsi untuk mencari orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik caranya melalui kontak pribadi dan persuasi juga di usahakan untuk menarik golongan muda untuk mengganti pimpinan lama
- d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik dalam suasana demokrasi: Perasingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktek politik sering di lihat bahwa fungsi-fungsi di atas tidak di laksanakan seperti yang di harapkan. Misalnya; informasi yang di berikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat: yang di kejar bukan kepentingan nasional, akan tetapi kepentingan partai yang sempit dengan akibat pengkotakan politik atau konflik tidak di selesaikan, akan tetapi malahan di pertajam.⁶

Adapun tujuan partai politik itu di bagi menjadi dua yaitu dalam pasal 5:

- a. Tujuan umum partai politik adalah:
 1. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam pembukaan UUD 1945.

⁶ Miriam budiardjo, *op. cit.*, hlm.163-164

2. Mengembangkan kehidupan demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dengan memuliakan hak rakyat sebagai kedaulatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di dalam pasal 7 partai politik sebagai lembaga demokrasi berfungsi untuk:

- a. Membina dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembentukan atau pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan perwakilan rakyat.
- c. Membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.⁷

Dalam keragaman partai politik, setiap partai politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggotanya, karena itu partai politik bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya. Dengan demikian, pihak-pihak yang berada di luar partai politik tidak dibenarkan campurtangan dalam urusan rumah tangga partai politik. Untuk mencapai sesuatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat yang di cita-citakan oleh para pendiri negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Setiap partai politik dalam kehidupan bernegara melaksanakan secara konsisten Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian dinamika demokrasi di Indonesia mendapatkan landasan yang kokoh

⁷Andi A. Mallaranggeng, *UU Politik Buah Reformasi Setengah Hati*, (Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara, 1999), hal. 71-72

karena acuan utama partai politik telah di sepakati, maka setiap partai politik mempunyai asas atau ciri. Aspirasi dan program partai politik merupakan pengejawatan dari asas atau ciri. Dalam upaya memecahkan masalah bangsa indonesia program tersebut di serahkan untuk mewujudkan cita nasional bangsa indonesia dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila sebagai tujuan umum dan memperjuangkan cita-cita para anggotanya sebagai tujuan khusus partai politik.

Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai politik juga merupakan sebagai salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik. Semua fungsi ini di wujudkan melalui dengan pemilihan umum yang di selenggarakan secara demokratis, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pengumuman suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia sebagaimana di amanatkan dalam tap MPR nomer XIV/MPR 1998 tentang perubahan dan tambahan atas tap MPR nomer III/MPR/1988 tentang pemilihan umum setelah memenuhi syarat keikutsertaan sebagaimana di atur dalam UUD tentang pemilihan umum.⁸

4. Tugas dan Tanggung Jawab Partai Politik

⁸. *Ibid.*, hlm. 159-160.

Adapun tugas-tugas partai politik yang tertuang dalam pasal 9 di jelaskan sebagaimana berikut ini:

- a. Melaksanakan, mengamalkan dan memegang teguh pancasila serta konstitusi negara.
- b. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyukseskan pembangunan nasional dan,
- d. Menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁹

B. Madrasah.

1. Pengertian Mutu Pendidikan.

Secara umum, Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian Mutu mencakup *input, proses, dan output pendidikan*.

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala madrasah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb.). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas,

⁹*Ibid.*, hlm. 72

rencana, program, dsb. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya Mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula Mutu input tersebut.

Proses pendidikan merupakan berubahnya *sesuatu* menjadi *sesuatu yang lain*. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedang sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Dalam pendidikan bersekala mikro (tingkat madrasah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.

Proses dikatakan berMutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input madrasah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu *memberdayakan* peserta didik. Kata *memberdayakan* mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekadar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

Output pendidikan adalah merupakan kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. Kinerja madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan Mutu output madrasah, dapat dijelaskan bahwa output madrasah dikatakan berkualitas/berMutu tinggi jika prestasi madrasah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, EBTA, EBANAS, karya ilmiah, lomba akademik; dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan kejuruan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu madrasah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan¹⁰.

2. Pengertian Madrasah.

Bila kita akan melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada kata arab karena ajaran Islam itu di turunkan dalam bahasa tersebut. Kata "pendidikan" yang umum kita gunakan sekarang dalam bahas arabnya adalah "tarbiyah" dengan kata kerja "rabba". Kata "pengajaran" dalam bahasa arabnya adalah "ta'lim" dengan kata kerjanya "alama' pendidikan dan pengajaran dalam bahasa arabnya "tarbiyah wa ta'lim" sedangkan "Madrasah" dalam bahasa arabnya adalah "Tarbiyah Islamiyah".

¹⁰ Artikel Pendidikan, *Konsep Dasar MPMBM*, <http://www.dikdasmn.depdiknas.go.id>, hal. 7-8

Pendidikan menurut istilah seperti yang lazim di sepakati sekarang di zaman Nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang di lakukan oleh Nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan berda'wah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih ketrampilan berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang. Secara umum dapat kita katakan bahwa Madrasah itu adalah pembentukan kepribadian Islam.

Sedangkan pendidikan dalam Islam, syariat Islam akan di hayati dan di amalkan orang kalau hanya di ajarkan saja, tetapi harus di didik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai dengan ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. Dari situ segi kita m,elihat bahwa Madrasah itu lebih banyak di tujuakan kepada perbaikan sikap, mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik keperluan diri sendiri maupun orang lain. Dalam segi lainnya Madrasah tidak hany memisahkan antara amal dan iman. Oleh karena itu Madrasah adalah pendidikan amal soleh dan iman. Dan karena ajaran Islam berisi tentang sikap dan tingkah laku masyarakat menuju kesejahteraan perorangan dan bersama, maka Madrasah adalah pendidikan individu dan masyarakat. Semula orang yang bertugas mendidik adalah para Nabi dan Rasul selanjutnya para Ulama dan cerdik pandailah sebagai tugas dan kewajiban mereka.¹¹

Menurut Muhaimin dalam bukunya yang berjudul "Nuansa Baru Madrasah" pendidikan yang berdasarkan Islam ada 3 bagian yaitu:

¹¹. Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1992), hal. 29-30.

- a. Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam atau sistem pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan di kembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumbernya yaitu Alqur'an dan Hadis. Dengan makna lain, pendidikan yang di pahami dan di kembangkan dari atau di semangati serta di jiwai oleh ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumbernya yaitu Alqur'an dan Hadis. Dalam pengertian yang pertama ini Madrasah dapat terwujud pemikiran dan teori pendidikan yang berdasarkan diri atau di bangun dan di kembangkan dari sumber tersebut.
- b. Pendidikan keislaman atau Madrasah yakni upaya Madrasah atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian yang kedua ini dapat terwujud: (1). Segenap kegiatan yang di lakukan seseorang untuk membantu seseorang atau kelompok peserta didik dalam menanamkan atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk di jadikan pandangan hidupnya, yang di wujudkan dalam sikap hidup dan di kembangkan dalam ketrampilan hidupnya sehari-hari. (2). Segenap phenomina atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya atau tumbuhkembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.
- c. Pendidikan dalam Islam atau proses atau praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti proses bertumbuhkembangnya Madrasah dan umatnya, baik Islam sebagai

agama, ajaran maupun sistem budaya dan peradaban, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang.¹²

3. Tujuan Madrasah.

Tujuan adalah sesuatu yang di harapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Maka pendidikan, karena sesuatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan. Tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan sesuatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. Kalau kita melihat kembali pengertian Madrasah, akan terlihat dengan jelas sesuatu yang di harapkan terwujud setelah orang mengalami Madrasah secara keseluruhan yaitu kepribadian seseorang yang memuatnya menjadi "insan kamil" dengan pola taqwa. Insan kamil adalah manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah SWT. Ini mengandung arti bahwa Madrasah di harapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran agama Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia dan di akherat.

1) Tujuan Umum Madrasah.

¹² Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal.. 5-6.

Tujuan umum Madrasah harus sejajar dengan pandangan Islam pada manusia, yaitu makhluk Allah yang mulia yang dengan akal, perasaannya, ilmunya, kebudayaannya pantas menjadi kholifah di muka bumi. Tujuan umum ini meliputi pengertian, pemaknaan, penghayatan dan ketrampilan berbuat. Ini menempati institusi dan tingkah laku Madrasah. Tentu saja ada tujuan umum untuk tingkat dasar, tingkat sekolah lanjut, PT dan ada juga tujuan umum sekolah umum, sekolah kejuruan dan lembaga-lembaga pendidikan khusus dan sebagainya.

2) Tujuan Akhir Madrasah.

Madrasah berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk insan kamil dengan pola taqwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup sekarang. Madrasah berlangsung selama hidup untuk memupuk, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah tercapai. Orang yang sudah taqwa dalam bentuk insan kamil, masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyampaian, sekurang-kurangnya pemeliharaan supaya tidak luntuk dan berkurang. Tujuan akhir Madrasah itu dapat di pahami dalam firman Allah SWT Surah Al-Imron : 102.¹³

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Madrasah.

¹³ *Ilmu Pendidikan Islam*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983, hal: 28-29.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan Mutu pendidikan antara lain: pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat. Seperti yang kita ketahui pemerintah memiliki tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi:

- a. Manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia yang berbudi pekerti luhur.
- c. Manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan.
- d. Manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani.
- e. Manusia yang memiliki kepribadian mantap dan mandiri.
- f. Manusia yang memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pendidikan tersebut berbagai upaya dilakukan. Secara nasional kebijakan pendidikan agar pencapaian tujuan pendidikan nasional tercapai menurut amanah UUD 1945, dimana negara melalui pemerintah bertanggung jawab dalam upaya mencerdaskan bangsa, adalah dengan merifisi pendidikan nasional nomer 2 1989. upaya melakukan refisi tersebut tentu saja sejalan dengan visi nasional, agar seluruh bangsa Indonesia menjadi cerdas, karena dengan kecerdasan tersebut di yakini secara aksiomatik akan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, tepat hepotesis yang di bangun secara akademis, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka masyarakat tersebut akan menjadi cerdas, dan semakin cerdas suatu masyarakat akan meningkat juga tingkat kesejahteraannya.

Berbagai upaya yang di lakukan ke arah perbaikan Mutu pendidikan, dapat dilihat dari rencana strategis yang sedang dilaksanakan saat ini, yaitu sesuai

dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan untuk kurun waktu sampai dengan tahun 2004, tertuang dalam GBHN 1999-2004 meliputi:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju tercapainya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum.
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- e. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah/terpadu/menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai potensinya.

- f. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁴

Sehubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan kita masih di bawah standar alias belum memenuhi harapan. Di balik semua upaya yang telah dilaksanakan, masih memiliki catatan-catatan yang masih perlu dibenahi. Kita bisa memulai dari proses mengajar di sekolah. Dimana keterlibatan guru sangat besar manfaatnya, termasuk penyediaan fasilitas belajar mengajar. Bicara mengenai kondisi guru, sekarang masih banyak yang belum memenuhi standar nasional yang menyebabkan kualitas murid juga kurang bagus. Belum lagi penyediaan sarana dan prasarana belum memadai seperti yang diharapkan. Misalnya banyak gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dan harus segera dibenahi karena sangat mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan kita. Komitmen pemerintah sebenarnya cukup kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah telah berupaya namun belum dapat mengangkat totalitas kinerja dan peningkatan pendidikan. Jika melihat secara parsial kondisi pendidikan sempat dibenahi tetap belum signifikan mengangkat kualitas pendidikan.

Menurut Polling dalam Pendidikan Network pada tanggal 1 Juni 2007 Mutu pendidikan disebut sebagai hal utama bagi pendidikan yaitu antara lain:

1. Kurikulum/Silabus 31.56 % (107)
2. Jumlah Mata Pelajaran 0.88 % (3)
3. Kualitas Guru 28.02 % (95)

¹⁴ Muhyi Batubara, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2004), hal.52-54

4. Sarana/Prasarana/Peraga 9.44 % (32)

5. Teknik Belajar/Mengajar 27.73 % (94)

Menurut Polling di atas berarti Kualitas guru mempengaruhi Mutu pendidikan, bagaimana cara kita untuk meningkatkan Mutu guru, itu yang menjadi PR bagi pemerintah kalau menginginkan pendidikan di Indonesia lebih maju dan tidak tertinggal dengan Negara lain.

Faktor kesejahteraan, faktor yang paling menonjol dan sering dituding sebagai biang keladi kelemahan sistem pendidikan adalah rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Benarkah? Sebenarnya terlalu sulit untuk menjawabnya. Karena dalam konteks pendidikan akan bersinggungan secara langsung dengan mentalitas penyelenggara dalam lembaga pendidikan. Benarkah jika dengan disajahterakannya para guru sudah dapat ditarik garis linear terhadap peningkatan kualitas pendidikan?

Mengukur kinerja salah satu indikator keberhasilan bidang pendidikan adalah kemampuan dalam mengukur kinerja tenaga kependidikan. Benarkah dengan adanya peningkatan kesejahteraan, sebagaimana yang termaktub dalam UU Guru dan Dosen tersebut, para guru dan dosen dapat lebih meningkatkan kinerja. Atau jangan-jangan malah karena sudah terlalu "dimanjakan" maka akan semakin tidak menunjukkan kinerja yang baik. Pernyataan yang terakhir tentulah sangat tidak arif untuk disampaikan kepada para guru dan dosen yang secara kasat mata adalah pioner terdepan yang mengusung aspek moralitas bangsa. Merekalah yang menjadi garansi baik-buruknya moralitas anak bangsa ini ke depan. Saya Linda Oktavia Dewi setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan

di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright).¹⁵

C. Peran Elit Politik Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah

Pokok-pokok pikiran partai politik tentang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Politik pendidikan ditujukan untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, baik yang sifatnya lahir maupun yang, batiniah. Politik pendidikan menganut paham bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia.
2. Pendidikan di sekolah tidak sekedar ditujukan untuk membangun intelektualisme, tetapi terutama membangun karakter, mengajar pandai berbuat melalui daya cipta (inovasi) dan kreativitas dalam upaya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam setiap tingkatan dan jalur pendidikan, ada pelajaran tentang agama dan budi pekerti.
3. Perlu ditetapkan dengan jelas adanya jalur-jalur pendidikan, antara lain jalur pendidikan umum, pendidikan kejuruan dan pendidikan informal, yang masing-masing jalur mempunyai fungsi dan tujuan strategis sendiri. Masing-masing jalur harus mempunyai sasaran lapangan kerja yang jelas dalam pasar tenaga kerja.
4. Untuk menghasilkan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih di daerah sub-urban, pedesaan dan pertanian perlu dibangun sekolah-sekolah ke masyarakatan

¹⁵ *Peningkatan Kualitas Mutu Pendidika*, <http://Darmi.Blogspot.Com/20/07/07>

yang mempunyai ketiga jalur pendidikan. Sekolah kemasyarakatan bisa dikembangkan menjadi pendidikan Pra-Universitas.

5. Selain fungsi ekonomi, pendidikan adalah fungsi sosial. Pihak swasta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta berusaha memberikan hasil pendidikan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat industri perlu ikut serta memikirkan masa depan pendidikan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi yang juga penting bagi masa depan industri.
6. Para guru memperoleh gaji standar yang setingkat lebih baik dari tenaga kerja biasa dalam kelas yang sama. Demikian pula sekolah-sekolah memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang tidak mampu bersekolah. Kontribusi dana pemerinlah, pengusaha dan masyarakat umumnya bisa disalurkan ke sekolah-sekolah, antarlain, dalam bentuk beasiswa-beasiswa tersebut.
7. Politik pendidikan juga menganut faham desentralisasi dan otonomi. Daerah tingkat I menetapkan sendiri politik pendidikan di daerahnya dengan memperhatikan kondisi, potensi dan masa depan pembangunan daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat umum dan industri yang tergabung dalam Dewan Pendidikan Daerah menentukan standar Mutu pendidikan daerah dan kebijaksanaan pendidikan daerah. Pemerintah Pusat menetapkan standar Mutu pendidikan nasional yang diujikan secara sampling setiap periode tertentu untuk daerah-daerah.

8. Dalam faham otonomi, guru-guru di sekolah negeri bukan pegawai negeri. Tidak ada keterkaitan atasan dan bawahan antara Menteri Pendidikan dan para guru. Kementerian pendidikan adalah lembaga pemerintah yang membantu Presiden dalam menetapkan politik pendidikan secara nasional. Sekolah negeri hanya sekedar menunjukkan adanya kontribusi dana negara atau daerah. Pengelolaan dana diserahkan kepada sekolah bersangkutan dengan pertanggungjawaban kepada Dewan Pendidikan Daerah.
9. Asosiasi-asosiasi profesi, termasuk asosiasi profesi guru perlu dikembangkan untuk setiap daerah. Dengan demikian persaingan yang sehat antara profesi-profesi di daerah, dan antara lembaga-lembaga pendidikan yang menganut faham otonom akan meningkatkan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia, serta mendekatkan keterkaitan pendidikan dengan lapangan kerja dan dunia usaha.

Resep Nicholas Barr: Ternyata Indonesia bukan satu-satunya bangsa yang sedang menghadapi kondisi dilematis ini. Bangsa Inggris juga sedang menghadapi masalah pendidikan yang sama yakni, merosotnya kualitas akademik dan rendahnya akses golongan ekonomi lemah keperguruan tinggi. Dalam majalah *The Economist* edisi 8 September 2005, diungkapkan hasil survei Shanghai Jiao Tong University tahun 2004, dari 20 top world universities, 17 adalah universitas Amerika Serikat, 2 perguruan tinggi Inggris dan 1 universitas Jepang. Artikel tersebut juga mengungkapkan ketimpangan akses antara 2 negara, hanya 16 persen anak-anak keluarga kurang mampu di Inggris mendapatkan akses ke PTm, sedangkan di Amerika Serikat lebih dari 45 persen. 1. Penulis

adalah Guru Besar Kebijakan Publik dan Rektor Universitas Gadjah Mada. 2. Prof. Nicholas Barr, profesor ekonomi publik dari *London School of Economics* (LSE), mengajukan resep cukup menarik untuk dipelajari. Versi ringkas pikiran Prof. Barr sudah diterbitkan di harian *The Guardian* edisi Juni 12, 2003 dengan judul “*How best to widen university access – by abolishing fees as Tories suggest, or by enhancing loans, as the government plans*”? Versi lebih lengkap diterbitkan dalam bentuk *white paper* berjudul “*Financing Higher Education: Comparing the Options*” yang disusunnya untuk Partai Buruh yang sedang berkuasa di Inggris. Menjelang Pemilu tahun 2004, salah satu agenda politik yang dipilih oleh dua partai yang sedang bersaing keras berebut dukungan publik Inggris adalah isu kemerosotan Mutu dan terbatasnya akses golongan lemah ke perguruan tinggi. Partai Torries, yang merupakan partai oposisi, berjanji akan meningkatkan akses golongan kurang mampu dengan memberi subsidi penuh kepada mahasiswa. Sebaliknya, partai buruh yang sedang berkuasa, menjanjikan akan meningkatkan akses golongan kurang mampu melalui pembayaran yang ditangguhkan (*deferred payments*). Sederhananya, para mahasiswa dari keluarga mampu boleh kuliah dulu dan membayar kemudian. Menurut penilaian Barr, subsidi penuh dan pembebasan biaya pendidikan tidak selalu menyebabkan akses yang lebih adil dan merata pada pendidikan tinggi. Menggunakan penerimaan dari pajak sebagai sumber pembiayaan pendidikan tinggi akan menyebabkan dana untuk program lainnya menjadi berkurang. Dalam *real politics*, subsidi untuk pendidikan tinggi selalu kalah dengan sistem kesehatan nasional dan untuk membiayai pendidikan wajib dan program pra-sekolah. Kedua, dalam pelaksanaannya subsidi di Inggris selalu

kurang menguntungkan kelompok miskin. Selama bertahun-tahun, akses keluarga kurang yang mampu kependidikan tinggi hanya 15 persen, dibandingkan 81 persen dari keluarga mampu. Sebaliknya, di Amerika yang mengikuti sistem pasar, akses keluarga kurang mampu mencapai 43 persen. Ketiga, subsidi pemerintah selalu lebih menguntungkan kelompok yang lebih baik kondisi ekonominya. Di Inggris cukup banyak anggota masyarakat yang mendukung rencana sistem pajak progresif. Namun, mereka mengharapkan penerimaan pemerintah dari pajak lebih digunakan untuk pendidikan pra-sekolah, menurunkan angka *drop-outs* pada SLTA, meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, serta program khusus untuk anak-anak keluarga tidak mampu.

Mungkinkah diterapkan di Indonesia? Seperti halnya di Inggris, pendidikan tinggi kita saat ini sedang menghadapi 3 tantangan yang amat berat yakni peningkatan Mutu, akses yang merata dan adil bagi semua golongan masyarakat, dan efisiensi internal yang masih rendah. Biaya yang diperlukan untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut amat mahal. Simulasi yang diadakan oleh rekan-rekan di UGM, memperkirakan biaya untuk meningkatkan akses keluarga kurang mampu dari kondisi sekarang, 3.3 persen menjadi 10 persen dengan angka partisipasi pendidikan tinggi sebesar 15 persen, adalah Rp. 1,8 trilyun. Kalau peningkatan akses disertai upaya peningkatan Mutu pendidikan, diperlukan biaya pendidikan sebesar Rp. 7,6 trilyun, dengan catatan biaya pendidikan Rp. 18 juta per mahasiswa per tahun seperti rencana Ditjen Dikti. Untuk meningkatkan Mutu plus memperbesar akses pendidikan tinggi, jumlah dana yang harus disediakan mencapai Rp. 9,4 trilyun trilyun. Bila standar Mutu

yang hendak dicapai lebih tinggi, misalnya seperti standar Mutu di PT Malaysia, diperlukan anggaran sebesar Rp. 29,7 trilyun per tahun. Mungkin para calon Presiden yang ingin memperoleh dukungan dari masyarakat dapat menggunakan isu peningkatan Mutu dan perluasan akses sebagai salah satu platform politik. Paling tidak ada tiga opsi yang dapat ditawarkan oleh para calon sebagai platform politik mereka. Opsi pertama, seperti opsi yang dipilih Partai Torries di Inggris, tawaran pemberian melalui subsidi pemerintah untuk pendidikan tinggi, Untuk merealisasikan janji politik ini perlu disediakan anggaran pendidikan tinggi sebesar Rp. 9,4 trilyun sampai Rp. 29,7 trilyun, tergantung dari standar Mutu dan tingkat partisipasi yang hendak dicapai. Artinya diperlukan peningkatan pengeluaran untuk pendidikan tinggi antara 2,1 sampai 7 kali, tergantung dari standar Mutu yang hendak dicapai. Opsi kedua, menawarkan subsidi silang dengan menerapkan *full-payment* kepada keluarga mampu, memberi subsidi penuh kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu, dan subsidi 50 persen kepada mahasiswa dari keluarga berpenghasilan menengah. Biaya opsi ini berkisar antara Rp. 3,6 trilyun sampai Rp 13,9 tergantung dari standar Mutu yang hendak dicapai. Opsi ketiga, menawarkan Kredit Pendidikan Tinggi dengan subsidi bunga kepada keluarga tidak mampu dan keluarga kurang mampu. Jumlah kredit tergantung dari besarnya biaya pendidikan yang dikenakan oleh masing-masing Universitas. Biaya yang harus disediakan Pemerintah untuk subsidi bunga berkisar antara Rp. 475 milyar sampai Rp. 2,17 trilyun per tahun, tergantung dari standar Mutu yang diterapkan. Para calon Presiden, silahkan pilih salah satu opsi ini sebagai agenda kebijakan. Lima juta warga kampus pasti akan

mendukung Calon Presiden yang paling peduli dengan nasib mereka dan masa depan bangsa Indonesia. (Yogyakarta, 22 Juni 2003).¹⁶



¹⁶. Artikel Pendidikan, *Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi*. <http://Sofian>. Staff. UGM.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian dibutuhkan data yang obyektif, pembahasan penelitian dibahas secara teoritis dan empiris. Pembahasan teoritis bersumber pada kepustakaan yang merupakan karangan ahli yang terkait dengan judul penelitian ini.

Sedangkan pembahasan empiris, bersumber dari peneliti dengan cara mencari, mengamati dan mengelola data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan " metodologi kualitatif " sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke-dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.¹⁷

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3

Adapun karakteristik penelitian kualitatif antara lain yaitu: (a) berlangsung dalam latar yang alamiah, (b) peneliti sendiri merupakan instrumen atau alat pengumpul data yang utama, (c) analisis datanya dilakukan secara induktif.¹⁸

Lebih lanjut penelitian ini bermaksud untuk melukiskan secara lengkap dan akurat tentang fenomena sosial, sehingga penelitiannya menggunakan desain penelitian deduktif, yakni studi untuk menemukan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam desain deduktif ini, termasuk desain untuk studi formatif dan eksploratif yang berkehendak hanya untuk mengenal fenomena-fenomena untuk keperluan studi selanjutnya. Dalam studi deskriptif juga termasuk:

- a. Studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok, atau individu.
- b. Studi untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu keadaan untuk meminimisasikan bias dan memaksimalkan reliabilitas.¹⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan DPC PKB yang berlokasi di Kota Malang sebagai obyek dalam penelitian ini.

Peneliti memilih Ketua DPC PKB Kota Malang, Sekretaris DPC PKB Kota Malang, DPR dari Fraksi DPC PKB Kota Malang, Kepala Sekolah madrasah. Sebagai obyek penelitian adalah dengan alasan bahwa seluruhnya itu merupakan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1988, Cet. III), hlm. 105

unsur yang sangat penting, yang keberadaannya sangat menentukan keberhasilan peneliti untuk mendapatkan data yang Valid. menurut hemat kami sangat menarik untuk diteliti.

C. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.²⁰

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.²¹

D. Kehadiran Peneliti dan Informan Penelitian

Manusia merupakan instrumen dari penelitian, maksudnya, kedudukan manusia dalam penelitian kualitatif sangat rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat

²⁰ Lexy J. Moleong, *Op.cit.*, hlm. 112

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 107

peneliti di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.²²

Dengan demikian, maka peneliti dalam hal ini bertindak sebagai instrumen penelitian yang didukung dengan interview terpimpin, yakni dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman interview yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Kemudian observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan, dan yang terakhir adalah dengan metode dokumentasi yaitu dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat catatan harian dan sebagainya, berdasarkan pada pedoman dokumentasi.²³

Jadi selain peneliti sendiri sebagai instrumen, maka didukung pula dengan yang lain yaitu :

- a. Pedoman wawancara yaitu ancer-ancer pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan, serta alat tulis untuk menuliskan jawaban yang diterima.²⁴
- b. Pedoman observasi berisikan sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.²⁵
- c. Pedoman dokumentasi yakni membuat garis-garis besar atau katagori yang akan dicari datanya.²⁶

²² Lexy J. Moleong, *op. cit*, hlm. 121

²³ Suharsimi Arikonto, *op cit*, hlm. 132-135

²⁴ *Ibid.*, hlm. 126

²⁵ *Ibid.*, hlm. 133

²⁶ *Ibid.*, hlm. 135

- d. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang?
- e. Apa yang melatarbelakangi elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Madrasah di Kota Malang?
- f. Bagaimana peran elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang?

Salah satu wawancara²⁷, seorang informan telah menjelaskan tentang nama-nama informan yang berkiprah dalam politik di Kota Malang yang dapat dijadikan subyek penelitian ini. Adapun nama-nama mereka sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Wilayah	Keterangan
1	H. Fatchullah	Politisi - Legislatif	Sukun kota Malang	Dewan Syuro DPC PKB kota Malang
2	H. M. Fauzan, SE. MM.	Politisi - Legislatif	Blimbing kota Malang	Dewan Syuro DPC PKB kota Malang
3	Drs. H. Fathol Arifin, M.H.	Politisi - Legislatif	Kedungkandang kota Malang	Ketua DPC. Kota Malang
4	Dra. Hj. Ngatmiati	Politisi - Legislatif	Kedungkandang kota Malang	Ketua Muslimat NU kota Malang
5	Abdul Wahit, ST.	Politisi - Legislatif	Blimbing kota Malang	Ketua PAC. PKB
6	H. Syafradji, SH.	Politisi - Legislatif	Sukun kota Malang	Dewan Syura DPC PKB

²⁷ Wawancara dengan Imam Syafi'i salah seorang Pengurus DPC PKB kota Malang, pada tanggal 28 Desember 2007 di Kantor DPC PKB kota Malang, pk1. 09.05 – 10.00

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁸

Metode interview yaitu merupakan suatu proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain, mendengar dengan telinganya sendiri, suara adalah alat kesimpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam (tercatat) atau interest.²⁹

Jadi, dalam penelitian ini sesuai dengan metode ini dalam mengumpulkan informasi juga melalui cara wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang dapat memberikan informasi yang valid dan komplit tentang "Peran Elit Politik Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang" adapun pihak-pihak tersebut adalah :

- a) Ketua DPC PKB Kota Malang.
- b) Sekertaris DPC PKB Kota Malang
- c) DPRD dari Fraksi PKB Kota Malang
- d) Kepala Madrasah Kota Malang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 132

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 192

b. Metode Dekomentasi.

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³⁰ Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kinerja Elit Politik PKB kota Malang dalam peningkatan Mutu Madrasah di kota Malang, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Dokumen dan record digunakan untuk keperluan penelitian, menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip dalam Moleong,³¹ karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- a. Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
- c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks.

Sedangkan sifat dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu suatu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga sebagai obyek penelitian yang telah mendapatkan legalitas atau pengesahan dari yang berwenang.

c. Metode Observasi

Sering sekali orang mengartikan observasi sebagai aktifitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian

³⁰ Suharsimi, *Op. Cit.*, 206

³¹ *Ibid.*, 161.

psikologi, observasi atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dilakukan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar, rekaman suara, dokumentasi.

Menurut Marzuki metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.³²

Metode ini sangat tepat untuk mengetahui obyek secara langsung tentang suatu peristiwa, kejadian maupun masalah yang sedang terjadi di lapangan penelitian. Dalam hal ini metode observasi digunakan untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi umum, lingkungan masyarakat, kegiatan PKB dan keadaan fasilitas belajar di sekolah-sekolah.

Jadi, dengan menggunakan model ini berarti peneliti dapat melakukan pengamatan langsung terhadap kancah penelitian dan sebagai obyek penelitian, terutama mengenai peran elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap yang dilakukan.³³ Pertama adalah tahap pendataan informan. Tahap ini sebenarnya tidak terlalu sulit mengingat

³² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 1989, hlm: 58

³³ Pengolahan data dalam penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa metode yang ditawarkan para peneliti hukum, antara lain Bambang Sunggono dalam bukunya, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) dan Lexy Moleong dalam bukunya, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

banyaknya orang yang dianggap mampu untuk mewakili suara kelompok ini. Setelah mengkaji nama dan instansi yang mewakili, maka peneliti mulai mengumpulkan data dengan mewawancarai mereka. Setelah data dari informan dianggap cukup, maka proses selanjutnya adalah transkrip kaset. Proses ini niscaya dilakukan karena hasil wawancara direkam dalam pita kaset. Untuk mendapatkan gambaran lengkapnya, maka suara dalam pita kaset dipindah dalam bentuk teks sehingga memudahkan pengolahan datanya.

Tahap selanjutnya adalah pengelohan data. Tahap ini termasuk tahap yang penting karena data yang sudah terkumpul akan bermakna dan berbicara banyak dalam tahapan ini. Proses pengolahan data setelah transkrip kaset adalah editing, tahap ini dilakukan untuk mengecek keterwakilan kelengkapan para informan. Setelah editing, langkah berikutnya adalah klasifikasi. Maksudnya adalah untuk menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam beberapa kategori. Tahapan setelahnya adalah analisa sebagai tahap yang paling penting karena disinilah letak signifikan dari penelitian ini³⁴. Apapun yang didapat dalam analisa akan menjadi rekomendasi yang nyata untuk Pemerintah Kota Malang. Dan terakhir adalah kesimpulan yang merupakan akhir dari tahapan analisa dengan mengambil satu statemen utama yang akan dijadikan sebagai sebuah konklusi.

G. Metode Analisis Data

Maksud dari analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

³⁴Suharsimi, *Op. Cit.*, 209-210.

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁵

Pengklasifikasian materi (data) penelitian yang telah terkumpul kedalam satuan-satuan, elemen-elemen atau unit-unit. Data yang diperoleh disusun dalam satuan-satuan yang teratur dengan cara meringkas dan memilih mencari sesuai tipe, kelas, urutan, pola atau nilai yang ada.

Seluruh data dari informan, baik melalui observasi, interview, maupun dokumentasi dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan menjadi suatu catatan lapangan atau field notes. Semua data itu kemudian dianalisis secara kualitatif.³⁶

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali kira-kira segudang. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data, dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu.³⁷

³⁵ Lexy J. Moleong. *op. cit.*, hlm.103

³⁶ Anonim. "Potret Pendidikan Anak-anak Pengungsi Sebuah Studi di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur" dalam Abd. Gafur. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Sains dan Teknologi Vol. 6. No. 2.* (Malang: UIN Malang, 2005), hlm. 131.

³⁷ Lexy J. Moleong. *op.cit*, hlm. 190

G. Pengecekan Keabsahan Data

Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan tehnik pemeriksaan. Adapun tehnik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut:³⁸

a. Perpanjangan Kehadiran Peneliti

Perpanjangan kehadiran peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Selain itu, menuntut peneliti untuk terjun kedalam lokasi penelitian dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

Di pihak lain perpanjangan kehadiran peneliti juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan pada subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Jadi, bukan hanya menerapkan tehnik yang menjamin untuk mengatasinya. Tetapi kepercayaan subyek dan kepercayaan diri merupakan proses pengembangan yang berlangsung setiap hari dan merupakan alat untuk mencegah usaha coba-coba dari pihak subyek.

b. Observasi Yang Diperdalam

Dalam penelitian ini, memperdalam observasi dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

³⁸ Lexy .J. Moleong. *op. cit.*, hlm.173

Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian menelaah kembali secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah di pahami dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentative dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

c. Trianggulasi

Yang dimaksud trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber data lainnya.³⁹

d. Tahap-tahap Penelitian

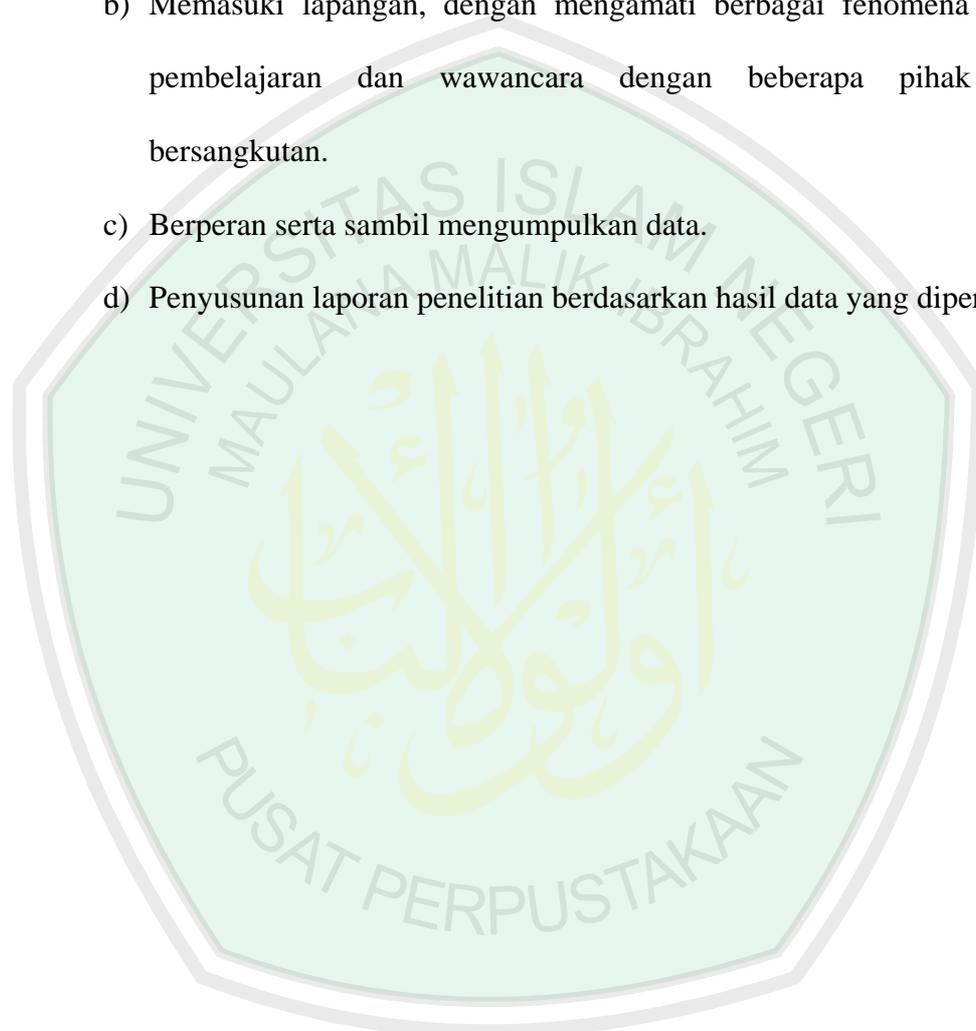
(1) Tahap pra lapangan

- a) Memilih lapangan, dengan pertimbangan bahwa PKB Kota Malang sangat menarik untuk diteliti, karena punya peran penting di dalam memajukan Madrasah di Kota Malang dan PKB sendiri adalah partai yang berasaskan Islam dan Nasionalisme
- b) Mengurus perizinan, secara formal (ke pihak pengurus DPC PKB Kota Malang).
- c) Melakukan perjajakan lapangan, dalam rangka penyesuaian dengan Peran DPC PKB Kota Malang selaku obyek penelitian.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 178

(2) Tahap pekerjaan lapangan

- a) Mengadakan observasi langsung ke DPC PKB Kota Malang, terhadap strategi dan peran elit politik PKB Kota Malang.
- b) Memasuki lapangan, dengan mengamati berbagai fenomena proses pembelajaran dan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan.
- c) Berperan serta sambil mengumpulkan data.
- d) Penyusunan laporan penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh.⁴⁰



⁴⁰ Moleong, *op. cit.* hlm. 85-103.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

Pada bab ini akan dipaparkan penemuan lapangan yang dilakukan selama penelitian yang akan diikuti bagian analisis di akhir pembahasan. Untuk bagian paparan data dari hasil wawancara, sajiannya dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang sudah saya konsep sebelumnya, dan menyajikan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, tetapi tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan yang lain. Sedangkan identitas para informan sudah saya jelaskan dalam bab metode penelitian.

A. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah Kota Malang

Mengenai langkah-langkah dan strategis yang dilakukan oleh anggota legislatif dari fraksi PKB kota Malang dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang, sebagaimana hasil wawancara secara acak dalam pengolahan data, maka hasil yang ditemukan bahwanya Elit Politik PKB kota Malang setidaknya sudah memberikan satu kontribusi terhadap pentingnya Madrasah dan pengembangan Mutunya di kota Malang, artinya bahwa legislatif dari fraksi PKB ini yang peneliti sendiri menyebutnya sebagai Elit Politik secara konseptual tidak ada program yang jelas dari PKB sendiri untuk memberikan fasilitas penuh terhadap pengembangan pendidikan sekalipun PKB sendiri lahir dari tubuh

Nahdlatul Ulama (NU) yang mempunyai yayasan pendidikan Ma'arif. Menurut H. Fatchullah⁴¹ dalam cuplikan wawancara sebagai berikut :

"Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para Elit Politik PKB kota Malang yaitu : (1) memberikan pendampingan kepada lembaga pendidikan, (2) Memperjuangkan kesejahteraan para guru madrasah. Kemudian kita berusaha untuk memberikan hal yang terbaik untuk meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang"

Apa yang dilakukan oleh Elit Politik, semata-mata untuk memberikan pelayanan dan membantu secara person kepada setiap lembaga pendidikan pada khususnya Madrasah baik itu berupa lembaga pendidikan formal seperti madrasah, tetapi juga kepada pendidikan non formal seperti pondok pesantren dan guru ngaji di musholla-musholla dan masjid-masjid kampung. Hal diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh Achmad Fauzan⁴², beliau mengatakan:

"Kita selalu memfasilitasi masyarakat sebagai wakil rakyat, baik secara formal maupun non formal, seperti halnya jika ada masyarakat yang membawa proposal ke rumah untuk lembaga pendidikan, maka akan kami perjuangan semaksimal mungkin, kalau bukan kami sebagai wakil rakyat yang dipercaya oleh masyarakat terus siapa lagi, tetapi secara khusus ada hal-hal yang kami prioritaskan seperti lembaga pendidikan al-Ma'arif"

Fauzan, dalam cuplikan hasil wawancara di atas, setidaknya ada dua hal yang prinsipal yang menjadi perhatian masyarakat. *Pertama:* masyarakat bukan hanya sekedar menunggu tanpa harus berusaha memberikan masukan dan menyampaikan problem-problem apa yang masyarakat hadapi. *Kedua:* Yang sangat dipriotitaskan oleh Elit Politik PKB kota Malang menurut Fauzan adalah lembaga pendidikan yang ada dibawah naungan al-Ma'arif, tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan memperjuangkan lembaga-lembaga pendidikan umum,

⁴¹ Wawancara tanggal 12 November 2007 di kantor DPRD kota Malang

⁴² Wawancara tanggal 12 November 2007 di kediaman Pak Fauzan

hatta itu lembaga pendidikan non Islam, karena Islam itu adalah *rahmatan lil 'alamin*, dalam konteks universal.

Selanjutnya H.M. Syafraji⁴³, salah seorang anggota Dewan dari fraksi PKB, mengatakan :

"Hal-hal yang kita lakukan untuk membantu lembaga Madrasah, yang terpenting adalah selain memberikan pendampingan, juga melengkapi sarana-sarana penunjang seperti pengadaan buku dan alat penunjang lainnya, tetapi hal itu diluar pengetahuan kita kalau masyarakat tidak melaporkan kepada kita"

Selain pendampingan dan memperjuangan kesejahteraan guru madrasah, juga melengkapi sarana dan prasarana sekolah/madrasah. Media pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan Mutu Pendidikan, disamping itu juga media pendidikan itu bukan hanya sekedar alat untuk mematangkan kecerdasan anak didik, tetapi juga sebagai penyalur bakat dan kreatifitas siswa, seperti pengadaan mesin jahit, pengadaan laboratorium komputer dan bahasa.

Selain langkah-langkah dan strategis di atas Cak Fahcul Arifin⁴⁴ juga memberikan komentar terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan Elit Politik PKB kota Malang selain di atas juga sebagai berikut :

"Kalau kita memberikan bantuan secara pribadi kepada lembaga pendidikan, kita juga akan koalahan, dan kalau terus menerus, itu namanya memanjakan pemerintah. Maka dari itu hal yang terpenting kita lakukan dengan segala keterbatasan sebagai manusia yaitu memfasilitasi instansi pendidikan dengan Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama yang sudah menjadi kompetensi Diknas dan Depag untuk memperhatikan lembaga pendidikan, khusus pendidikan agama seperti madrasah, itu sudah kita lakukan dan berhasil"

⁴³ Wawancara tanggal 14 November 2007 di rumah pak Syafraji

⁴⁴ Wawancara tanggal 18 November 2007 di kediaman beliau

Perjuangan dan pengabdian memang tidak kenal batas dan waktu selagi kita punya kemampuan untuk benar-benar memperjuangan dan insya Allah bernilai pahala, tetapi bukan hanya berhenti hanya sekedar mengharap pahala saja, tetapi banyak hal yang perlu dilakukan untuk membantu dan memberikan yang terbaik buat manusia, apalagi yang kita perjuangan adalah hal yang mulia seperti memperjuangan lembaga pendidikan.

Selain langkah-langkah sebagaimana diatas para Elit Politik PKB kota Malang, memberikan beasiswa kepada anak didik, baik dari tingkat TK, Madrasah Ibtida'iyah, Madrasah Tasanawiyah maupun Madrasah Aliyah, bahkan Perguruan Tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hj. Ngatmiati⁴⁵:

Disamping kita memfasilitasi masyarakat dalam hal kesejahteraan atau fasilitas pendukung masyarakat lainnya, kita juga peduli terhadap lembaga pendidikan, bukan hanya lembaga pendidikan al-Ma'arif saja, yang kebetulan punyanya NU, dan PKB sendiri lahir dari tubuh NU, tetapi memang itulah tugas sebagai Dewan tanpa harus melihat perbedaan warna baju, agama maupun ras. Kita netral sebagai dewan, netral dalam arti tidak memihak secara nyata dan masyarakat mengetahui. Nah... untuk itulah anggota Dewan bukan hanya memikirkan bagaimana lembaga pendidikan bisa maju secara kuantitas, tetapi lebih-lebih maju juga karena kualitas, dan kualitas itu didalamnya ada guru dan siswa, maka dari itu membantu siswa dalam hal memberikan bantuan berupa beasiswa itu sangat dibutuhkan, karena kita lihat sendiri banyak siswa yang putus sekolah karena tidak mampu membayar SPP dan sebagainya.

Selain strategi dan langkah seperti di atas bahwa secara umum bahwasanya PKB sendiri tidak mempunyai program kerja khusus untuk anggaran pendidikan, karena PKB itu bukan institusi pemerintah atau swadaya, tetapi PKB itu adalah institusi politik, dan mana mungkin institusi politik bisa memberikan dan meningkatkan Mutu pendidikan sekolah.

⁴⁵ Wawancara tanggal 15 November 2007 di kantor Dewan kota Malang

B. Latar belakang peran elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.

Setelah kita memaparkan langkah-langkah maka selanjutnya akan melihat apa yang melatar belakangi para elit politik dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Madrasah kota Malang berikut cuplikan wawancaranya dengan H.M. Syafraji:⁴⁶

"Salah satu hal yang membuat kita peduli terhadap institusi Madrasah khususnya di kota Malang adalah kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kelangsungan pendidikan, contoh kecil saja saat pemerintah ingin menganggarkan anggaran pendidikan itu 20 % dari APBD sampai saat ini masih belum gol, sebenarnya ada kepentingan apa pemerintah mempersulit hal yang demikian. Hingga akhirnya banyak intitusi pendidikan yang gulung tikar. Keperihatinan dan rasa iba dan niat mulia dari kita sebagai Elit Politik kota Malang untuk benar-benar memperjuangkan Mutu Madrasah khususnya di kota Malang sebagai kota pendidikan"

Namun menurut Ibu Hj. Ngatmiati,⁴⁷ salah satu anggota legeslatif dari fraksi PKB yang melatar belakangi dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Madrasah kota Malang

"Bahwa APBD ikut menganggarkan Madrasah dan Guru agama Islam tidak tetap karena dirasa Mutunya sangat rendah maka sekarang mulai sudah dibantu oleh Depag dan Diknas dulunya Depag terus yang bantu tapi sekarang Diknas pun juga sudah membantu. Ini juga tidak terlepas dari perjuangan Kami di Dewan komisi D terutama yang dari PKB karena kita tau konstituen PKB itu memang kita lihat Mutu pendidikannya sangat rendah kaerna besik mereka dari agama yang tidak mempunyai pasilitas yang memadai, oleh sebab itu kami memperjuangkan sarana dan perasarana mereka hingga tercukupi dengan tercukupi sarana prasaran maka Mutu pendidikan merekapun akan meningkat. Ini sudah saya perjuangkan dan sudah berhasil keberhasilan kami ini bisa dilihat dari adanya SK bersama Depag dan Diknas untuk biaya pendidikan dibawah naungan diknas itu mendapat *Enam Puluh Persen* sedangkan dibawah naungan Depag itu itu *Empat puluh persen* ini di biyai Pemerintah istilahnya itu kerjasama antara Depak pusat dan Diknas pusat"

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Wawancara tanggal 15 November 2007 di kantor Dewan kota Malang

Awalnya praktek dari bawah akhirnya diserap oleh Mendagri, oo ini prakteknya Depag khususnya sekolah-sekolah di bidang agama ini kurang Mutunya, istilahnya agak kesenjangan antara yang umum dengan yang agama, setelah dari bawah kita sampaikan berdasarkan kenyataan tentunya, terus akhirnya kita sampaikan begitu, memang dari asuransi bawah sejak menjadi dewan, ya karna saya dari PKB tentunya saya perhatikan pendidikan-pendidikan agama, karena pendukung PKB itu banyak yang mendapat pendidikan agama, maka saya punya kewajiban untuk meningkatkan Mutu pendidikan mereka, terutama yang ada dilembaga pesantren dan madrasah-madrasah.

Senada dengan apa yang dikemukakan Nur Wakhit, ST⁴⁸ juga merupakan anggota legeslatif dari Fraksi PKB berikut wawancaranya.

"Untuk meningkatkan Mutu pendidikan di Kota Malang tentunya dapat dirasakan oleh masarakat terutama pendidikan murah dan terjangkau yang mana Mutu pendidikannya tidaklah jauh dengan pendidikan yang mahal. Dalam makna luas, pendidikan semestinya menjadi korpus teladan yang diletakkan di garda depan (mainstream paradigma). Tentunya dalam memperjuangkan anggaran tersebut tidak terlepas dari dewan-dewan yang ada dikomisi-komisi yang lain. Dulu kita lihat bahwa bantuan-bantuan hanya diperuntukkan kelembagaan seperti SD, SMP dan SMA namun sekarang bisa dirasakan oleh MI, MTs, dan MA serta pesantren dan guru-guru ngaji yang sudah mendapat insentif. Ini juga tidak terlepas dari perjuangan PKB yang senantiasa merespon dari kebutuhan masarakat dalam hal pendidikan yang bisa terjangkau dalam artian murah dan berMutu"

C. Peran elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.

Setelah kita memaparkan langkah-langkah maka selanjutnya akan melihat apa peran elit politik dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Madrasah kota Malang dengan H.M. Fathul Arifin, SH.,M.H.⁴⁹ beliau adalah ketua DPC PKB kota Malang berikut cuplikan wawancaranya

⁴⁸ Wawancara tanggal 15 November 2007 di Kantor Dewan kota Malang

⁴⁹ Wawancara tanggal 18 November 2007 di kediaman beliau

"Beliau mengatakan: kebetulan pengelola Madrasah, MI, MTs, dan MA itu kebanyakan orang NU jadi pemerintah Kota Malang itu moh memberikan kucuran dana kepada madrasah jadi dana pendidikan itu lebih banyak larinya ke pendidikan umum, madrasah itu lebih termarginalkan, la di Partai di bahas secara husus bagaimana kemudian partai memperjuangkan dana pendidikan itu tidak hanya lari kepada sekolah negeri saja namun juga kesekolah swasta alhamdulillah anggaran pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sudah sama dengan SD Negeri di Kota Malang ini. Ketika SD itu dikucurkan dana satu milyar maka MI juga sama. Saya hampir tiap tahun membawa proposal MI dan Madrasah untuk direhap Alhamdulillah semuanya bisa mendapatkan dana rehap dan sukses. ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama adalah revitalisasi budaya bangsa. Artinya bangsa ini harus kembali berpedoman kepada Pembukaan UUD 1945, bahwa pendidikan adalah upaya utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki kreativitas pribadi yang terpuji. Kedua, mengenai manajemen pendidikan. Sistem pendidikan nasional yang disempurnakan dan disahkan pada 2003, implementasinya harus dilakukan dengan manajemen atau pengelolaan yang proporsional dan profesional, baik di tingkat makro maupun di tingkat mikro"

Ia begini karena di Kota Malang ini belum pernah di perintah kayak orang-orang kita jadi kita untuk mengggolkan kebutuhan MI maka kita melakukan pola pendekatan yang nantinya bisa menghasilkan untuk MI, sama kita juga melakukan pendekatan kediknas karena tidak sama dana yang dikucurkan kemadrasah jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan tentunya dengan bentuk kerja sama dengan diknas sehingga bisa menggugah diknas untuk mengkucurkan dana ke madrasah-madrasah dengan harapan bisa sama anggarannya dengan sekolah umum. Selain itu saya juga bangun jaringan atau kekuatan dengan legelatif pusat seperti yang ada di Propensi dan pusat, mereka yang tau pos-pos dana pendidikan yang akan dikucurkan kedaerah-daerah kemudian kalau saya tau maka saya bertemu langsung dengan diknas yang ada di Kota untuk menanyakan dana tersebut dan akan mengawal proses pengkucuran dana tersebut hingga sampai ketujuannya yaitu kemadrasah. Ini juga tidak terlepas dari teman legeslatif PKB yang memperjuangkan Madrasah selama menjadi anggota legeslatif.

Begitu juga dengan Drs. M. Achmad Fauzan, SE. M.Si.⁵⁰ beliau juga mekatakan sebagai berikut :

Selanjutnya hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan Mutu pendidikan, khususnya Madrasah adalah mendorong diknas selaku pengelola pendidikan dan membantu kesulitan masyarakat terutama pada waktu masuk

⁵⁰ Wawancara tanggal 23 November 2007 di kantor DPC PKB kota Malang

sekolah : Misalnya anak-anak yang kurang mampu juga harus masuk sekolah kalo nggak kita geheran.

Untuk memberikan satu kepastian dan respon realisasi data dari paparan data diatas, maka tentunya peneliti sendiri akan melakukan proses pengecekan data terhadap hasil wawancara dengan para Elit Politik PKB kota Malang. Maka dari itu peneliti menghadirkan dua instansi Madrasah yaitu Madrasah Ibtida'iyah Sunan Kali Jogo dan Madrasah Tsanawiyah Sunan Kali Jogo, yaitu sebagai berikut :

Salah satu lembaga Madrasah di kota Malang memberikan pengakuan sepintas terhadap respon Elit Politik kota Malang dalam meningkatkan Mutu Madrasah. Nur Hidayat, S.Pd.⁵¹ selaku Kepala Sekolah MTs. Sunan Kali jogo mengatakan:

"Secara umum Elit Politik khususnya PKB kota Malang sudah melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan dan waki rakyat. Contohnya memperjuangkan kesejahteraan guru-guru ngaji, dan kesejahteraan guru-guru madrasah, disamping itu juga membantu secara pribadi untuk pembangunan renovasi sekolah dan masjid dan musholla, juga pondok pesantren"

Selain itu, Elit Politik PKB kota Malang pada khususnya bukan hanya sekedar membantu dalam hal kesejahteraan para tenaga edukatif, tetapi juga memfasilitasi lembaga pendidikan dan menyampaikan keluhan-keluhan sekolah kepada pemerintah baik Diknas maupun Depag, sehingga bisa memberikan bantuan sarana penunjang sekolah seperti laboratorium computer dan lain

⁵¹ Interview, tanggal 21 Februari 2008 di Ruang Kepala Sekolah MTs. Sunan Kali Jogo Malang

sebagainya. Hal ini senada dengan cuplikan hasil wawancara dengan Andik Bambang⁵² selaku guru Pembina Osis MTs. Sunan Kalijogo, ia mengatakan:

"Baru-baru ini MTs. Sunan Kali Jogo mendapatkan bantuan 2 buah TV, alat tulis kantor (ATK), Laboratorium Komputer, Mesin Jahit, dan Laboratorium Bahasa"

Melihat realita yang ada, terlepas itu ada hubungannya dengan kiprah Elit Politik PKB kota Malang atau tidak tetapi hal itulah yang dialami dan dirasakan oleh Lemabaga Pendidikan Sunan Kali Jogo Malan. Tetapi sebagaimana yang peneliti katakana bahwa secara umum sedikit besar ada hubungannya dengan peran dewan sebagai wakil rakyat untuk benar-benar memperjuangkan Mutu Madrasah, terutama di komisi D DPRD kota Malang.

Kemudian peneliti melanjutkan interview dengan kepala sekolah Madrasah Ibtida'iyah yaitu Ibu Supriati, S.Pd.⁵³ Iia mengatakan :

"Untuk kesejahteraan guru-guru MI pada khususnya, terutama guru tetap, *alhamdulillah* sudah mendapatkan Rp. 200.000,- perbulan dari pemerintah, disamping mereka (guru) juga mendapatkan gaji pokok dari Yayasan, kemudian Madrasah Ibtada'iyah juga mendapatkan sarana penunjang berupa 1 buah TV dan DVD juga dari pemerintah"

Secara umum, Yayasan Sunan Kali Jogo tidak terlalu banyak mengetahui tentang bagaimana peran Elit Politik kota Malang, khususnya dari PKB sendiri, dan lagi-lagi secara pribadi belum ada yang memberikan sesuatu yang bermakna bagi pengembangan Mutu Madrasah khususnya di Sunan Kali Jogo. Itulah cuplikan wawancara dengan Kepala Sekolah MI. Sunan Kali Jogo.

⁵² Interview, tanggal 21 Februari 2008 di Ruang Kepala Sekolah MTs. Sunan Kali Jogo Malang

⁵³ Interview, tanggal 21 Februari 2008 di Ruang Kepala Sekolah MI. Sunan Kali Jogo Malang

BAB V

ANALISIS DATA

Pada bagian ini akan diulas analisa hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dengan mendasarkan pada poin-poin penting yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Sebelum membahas lebih jauh tentang peran Elit Politik PKB kota Malang dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang, hal pertama yang dapat dipelajari dari informan, khususnya yang dianggap isensial adalah pendapat mereka tentang peran dan kiprah Elit Politik PKB kota Malang itu sendiri kemudian akan kita kaitkan dengan peran pemerintah kota Malang sebagai kota pendidikan yang informan lakukan di dewan. Dari hasil wawancara dengan informan, bahwasanya ada beberapa poin penting yang akan kita analisa :

A. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang

Mengenai langkah-langkah dan strategis yang dilakukan oleh anggota legislatif dari fraksi PKB kota Malang dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang, sebagaimana hasil wawancara secara acak dalam pengolahan data, maka hasil yang ditemukan bahwanya Elit Politik PKB kota Malang setidaknya sudah memberikan satu kontribusi terhadap pentingnya Madrasah dan pengembangan Mutunya di kota Malang, artinya bahwa legislatif dari fraksi PKB ini yang peneliti sendiri menyebutnya sebagai Elit Politik secara konseptual tidak

ada program yang jelas dari PKB sendiri untuk memberikan fasilitas penuh terhadap pengembangan pendidikan sekalipun PKB sendiri lahir dari tubuh Nahdatul Ulama (NU) yang mempunyai yayasan pendidikan Ma'arif. Menurut H. Fatchullah dalam cuplikan wawancara bahwa secara umum bahwasanya PKB sendiri tidak mempunyai program kerja khusus untuk anggaran pendidikan, karena PKB itu bukan institusi pemerintah atau swadaya, tetapi PKB itu adalah institusi politik, dan mana mungkin institusi politik bisa memberikan dan meningkatkan Mutu pendidikan sekolah.

Elit Politik PKB kota Malang didalam meningkatkan Mutu Madrasah kota Malang bahwa langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Memberikan pendampingan kepada lembaga pendidikan dan masyarakat

Bentuk dari pendampingan kepada lembaga pendidikan berupa pencairan dana untuk biaya renovasi bangunan seperti yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan selaku legeslatif dari Fraksi PKB yang membabawa proposal ke wali kota Malang hingga cair, ini adalah salah satu bukti peran Elit Politik PKB dalam meningkatkan Mutu pendidikan, namun perlu di ketahui tidak semua lembaga pendidikan mendapatkan dana renovasi dikarenakan menurut pengakuan Fauzan mereka mengantarkan proposal renovasi untuk lembaga sekolah jika lembaga sekolah atau madrasah bersangkutan mengadukan kepada elit politik PKB namun jika tidak merekapun tidak mengetahui. Sedangkan pendampingan kepada masyarakat yaitu : dengan memperjuangkan anak yang kurang mampu untuk masuk kemadrasah unggulan dikarenakan biaya yang tinggi namun berkat bantuan Elit Politik PKB merekapun bisa masuk sekolah,

ini lagi-lagi harus ada pengaduan dari masyarakat jika tidak merkapun enggan terjun menjemput bola mereka terkesan menunggu bola terbukti dengan hasil wawan cara penulis dengan Ahmad Fauzan, beliau mengatakan kami juga manusia yang memiliki kesibukan sehingga waktu untuk terjun kemasyarakat kurang sempat begitu juga dengan anggota lainnya seperti H. Fathullah selaku ketua Fraksi PKB di DPRD kota Malang beliau juga mengatakan hal yang sama dengan Fauzan, namun jika mereka mendapatkan pengaduan barulah direspon.

2. Mempejuangkan kesejahteraan guru di Madrasah

Anggota legeslatif dari fraksi PKB memperjuangkan kesesejahteraan guru di Madrasah terutama guru swasta atau guru tidak tetap dengan cara menganggarkan serta mengusulkan dana kesejahteraan bagi guru-guru di Madrasah hingga benar-benar terwujud namun sekarang bisa kita lihat guru-guru benar-benar mendapat tunjangan dari Departemen Agama sebanyak 200 ribu ini kalau kita mau jujur gaji sebesar itu masih jauh dari kesejahteraan dari, sini kita dapat menilai ketika guru belum sejahtera maka kemungkinan besar kualitas pendidikan belum bisa meningkat karena guru pikirannya macam-macam untuk mencari uang tambahan jadi tidak konsen dalam mengajar, secara otomatis dapat kita ketahui siswa tidak akan maksimal menerima pelajaran.

3. Pengadaan fasilitas pendukung

Legeslatif juga memperjuangkan berupa pasilitas pendukung bagi lembaga sekolah Madrasah berupa mendorong Departemen Agama untuk

menganggarkan fasilitas yang dibutuhkan oleh lembaga Madrasah berupa pengadaan laboratorium bahasa, laboratorium komputer, buku perpustakaan, mesin jahit, dan TV 20 in. ketika kami cek kelengkapan di Madrasah Ibtida'iah dan MTs. Sunan Kalijaga, memang sudah ada sebagian, namun fasilitas yang sifatnya *on lane* belum ada seperti internet, sebagaimana kita tahu dengan adanya internet siswa nantinya mampu mengakses materi agama yang akan menambah pengetahuan tentang agama Islam. Dari fasilitas yang ada masih belum dirasa cukup untuk meningkatkan Mutu Madrasah karena jumlahnya sangat minim sekali.

4. Memfasilitasi Madrasah dengan Diknas dan Depag

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota legeslatif kota Malang dari fraksi PKB kota Malang yaitu Hj. Ngatmiati beliau mengatakan kami sudah melakukan kerja sama dengan Diknas dan Depag dalam hal penganggaran dana pendidikan kota Malang serta memfasilitasi pihak sekolah untuk melakukan dialog dengan audiensi dengan pihak Diknas dan Depag terkait seputar pendidikan baik masalah kualitas maupun tentang pendanaan. Dari analisa peneliti serta melakukan pengecekan data kepada kepala madrasah MI. Sunan Kalijogo beliau mengatakan belum merasa terfasilitasi namun beliau memang mengakui ada peningkatan bantuan intensif dari pada tahun yang lalu, ini juga menunjukkan belum ada keseriusan para legeslatif mermperjuangkan lembaga pendidikan Madrasah di Kota Malang, karena secara pribadi gaji tetap mereka harus di potong 40 % untuk dialokasi ke Partai. Apapun yang diperjuangkan oleh fraksi PKB DPRD kota Malang

untuk memberikan akses yang luas terhadap kepada lembaga pendidikan untuk bisa mendapatkan anggaran dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, khususnya sekolah-sekolah swasta yang mayoritas gurunya perlu mendapatkan insentif yang cukup, dan fasilitas-fasilitas yang memadai bagi pengembangan Mutu pendidikan di kota Malang.

5. Memberikan beasiswa kepada anak didik

Analisa dari poin kelima ini bahwa peserta didik merupakan praisai berharga untuk mencetaknya menjadi manusia yang berilmu dan berbudi luhur, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mewajibkan kepada generasi muda untuk menempuh pendidikan selama 9 tahun. Maka untuk mengimplementasikan amanat UUD 1945 Pasal 29 tadi, maka memerintah Indonesia menganggarkan 20 % dari APBD untuk pendidikan. Tetapi perlu dicatat bahwa alokasi anggaran tersebut bukan termasuk biaya pendidikan peserta didik, tetapi hanya diwujudkan berupa fasilitas sekolah sebagai penunjuang dalam proses pembelajaran. Maka dari itu banyak peserta didik yang putus sekolah dikarenakan tidak mampu untuk membayar SPP misalnya. Melihat dari fenomena diatas maka, peran wakil rakyat sangat diharapkan untuk bisa memberikan solusi atas keterbasan yang dimiliki oleh orang tua anak didik bangsa. Menurut Ngatmiati kami telah memperjuangkan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu melalui dana-dana yang dianggarkan oleh Pemerintah kota Malang dan melalui tabungan legeslatif dari Fraksi PKB. Kelima item trik dan stretegi di atas semata untuk mempertahankan bahwa kota Malang sebagai kota pendidikan *go internasional* dan sekaligus bernilai

ibadah, sebagai mana hasil wawancara dengan Fathul Arifin (ketua DPC.PKB kota Malang). Namun peneliti menganalisa dari paparan data yang ada ini

Sekilas memberikan argumen terhadap Mutu Madrasah, diakui atau tidak, bahwa krisis multidimensional yang melanda negeri ini membuka mata kita terhadap Mutu pendidikan Indonesia. Pun dengan sumber daya manusia hasil pendidikan yang ada di negeri ini. Memang, penyebab krisis itu sendiri begitu kompleks. Namun tak dipungkiri bahwa penyebab utamanya adalah sumber daya manusia itu sendiri yang kurang bermutu. Jangan harap bicara soal profesionalisme, terkadang sikap manusia Indonesia yang paling merisaukan adalah seringnya bertindak tanpa moralitas.

Dalam sebuah penelitian, diungkapkan bahwa produktivitas manusia Indonesia begitu rendah. Hal ini dikarenakan kurang percaya diri, kurang kompetitif, kurang kreatif dan sulit berprakarsa sendiri. Tentunya, hal itu disebabkan oleh sistem pendidikan yang *top down*, dan yang tidak mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Melihat realita yang ada maka kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia jauh tertinggal oleh negara-negara lain, maka peran elit politik dalam hal ini Elit Politik PKB Kota Malang yang duduk di kursi legislatif dan sebagai wakil rakyat seyogyanya harus memperjuangkan masyarakat bukan hanya dari segi kesejahteraan tapi dari berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Maka upaya elit politik PKB kota Malang berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan impian itu sehingga jargon Malang sebagai kota pendidikan tambah maju bukan hanya dalam kancah lokal tapi *go internasional* sebagaimana yang

icon yang selalu disampaikan oleh bapak walikota Malang dalam setiap moment. Hal yang demikian juga telah diutarakan dalam cuplikan wawancara dengan H. Fatkhul Arifin selaku Ketua Umum DPC PKB kota Malang. Memang, tak dipungkiri kalau lulusan dari lembaga pendidikan di Indonesia kurang relevan dengan kebutuhan tenaga yang diperlukan, sehingga hasilnya kurang efektif dan mendorong terjadinya pengangguran intelektual. Permasalahan masih ditambah lagi dengan minimnya fasilitas pendidikan yang memadai.

Hal ini saya memberikan penguatan dan dipertegas lagi dengan pernyataan Rektor UPI, Prof. Dr. M Fakry Gaffar yang mengatakan bahwa universitas atau perguruan tinggi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk "bertarung" dalam persaingan global. Karena itu, produk pendidikan negara ini masih kesulitan untuk bersaing dengan produk pendidikan negara lain. Namun, rendahnya kualitas itu tidak semata-mata karena sistem pendidikannya. Siswa atau mahasiswa Indonesia pun kurang memiliki upaya dan daya juang. Begitu pula dengan kurangnya akses masyarakat pada pendidikan itu sendiri. Bisa dibayangkan di negeri ini terdapat, 80 juta usia 6-24 tahun yang menuntut kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Namun sayang jumlah sebanyak itu belum tertampung.

Paling tidak, untuk mengatasi masalah ini, menurut Fathullah ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama adalah revitalisasi budaya bangsa. Artinya bangsa ini harus kembali berpedoman kepada Pembukaan UUD 1945, bahwa pendidikan adalah upaya utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki semangat juang yang tinggi dan

memiliki kreativitas pribadi yang terpuji. Kedua, mengenai manajemen pendidikan. Sistem pendidikan nasional yang disempurnakan dan disahkan pada 2003, implementasinya harus dilakukan dengan manajemen atau pengelolaan yang proporsional dan profesional, baik di tingkat makro maupun di tingkat mikro.

Lebih pada pelaksanaannya, Fakry mengajukan delapan poin paradigma pendidikan yang baru yakni *openess and flexibility in learning*, integrasi pendidikan ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, responsif terhadap perubahan, *total learning*, *learning strategies*, *teacher-student roles in learning*, *ICT (information and communication technology) in learning process* serta *learning content and learning outcome*.

Dengan delapan poin itu, paling tidak akan menjadi dasar agenda pendidikan ke depan yakni, pembahasan kurikulum, pembaruan dalam proses pembelajaran, pembenahan manajemen pendidikan nasional, pembenahan pengelolaan guru dan mencari serta mengembangkan berbagai sumber alternatif pembiayaan pendidikan. Tentu saja semua itu tak lepas dari anggaran biaya. Dalam hal ini, anggaran pendidikan kudu memadai dan harus diupayakan secara sungguh-sungguh agar anggaran pendidikan negeri ini sekurang-kurangnya mencapai 20% dari APBN ataupun APBD. Dan yang paling penting adalah, lembaga pendidikan sebaiknya bebas pajak. Bahkan bila perlu ada pajak untuk pendidikan.

Upaya dan usaha yang selalu diperjuangkan oleh elit politik PKB kota Malang yang duduk di legislatif terkait dengan anggaran pendidikan, wakil-wakil

rakyat khusus kota Malang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin akan kemajuan dan Mutu pendidikan di kota Malang. Hal ini bukan instansi Partai yang berperan tetapi Elit Politiknya, itupun elit Politik yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dengan membawa beberapa keluhan masyarakat dan instansi pendidikan, hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh H. Fathullah salah satu anggota legislatif dari unsur PKB. Terkait dengan hal itu, Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo dalam sebuah pidatonya di acara peringatan Hari Pendidikan Nasional menegaskan sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warganegara untuk memperoleh pendidikan yang berMutu. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan, memberdayakan dan memberadabkan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi dan Undang-undang Sisdiknas, dalam rangka mentransformasikan Indonesia menuju peradaban modern yang canggih, madani dan unggul.

Sebagai wujud nyatanya, pemerintah kota Malang mengupayakan secara terus menerus perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan agar memenuhi kebutuhan pengembangan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Hal ini dituangkan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, untuk kurun waktu 2004 – 2009. Renstra ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta

masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan sampai dengan 2009.

Dewan dalam hal ini para Elit Politik pada umumnya adalah bagian dari pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, maka dari itu keterlibatan mereka sangat diharapkan untuk membantu dan memperjuangkan hak anak bangsa untuk ikut dalam program pendidikan sembilan tahun. Wujudnya nyata dan realisasinya saat ini, khususnya Elit Politik kota Malang dalam hal ini PKB sendiri yang secara khusus dikenal dengan partai yang berbasis Islam seyogyanya akan selalu berusaha memperjuangkan yang berlebelkan Islam tanpa harus mengesampingkan pendidikan non Islam. Apapun yang diperjuangkan oleh para wakil-wakil rakyat tersebut setidaknya harus mempertimbangkan aspek legalitas, aspek prioritas, aspek perimbangan kewenangan pusat dan daerah dan melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata pendidikan dewasa ini, baik pusat maupun daerah, yang selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Dan sudah 62 tahun merdeka, mampukah kualitas pendidikan dapat diandalkan? Jawabanya, kembali lagi, bahwa mutu pendidikan, Indonesia ketinggalan jauh, di banding dengan negara-negara tetangga. Tentu saja, merosotnya mutu pendidikan, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Selama ini dan cenderung masih berlangsung hingga sekarang, perhatian pemerintah untuk memajukan pendidikan kurang. Dan selagi pembangunan pendidikan ditempatkan

diurutan ke sekian. Maka jangan berharap Indonesia mampu tampil di era globalisasi yang terus menggerus dunia ini.

B. Latar belakang Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Malang dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang

Pendidikan di Malang masih sangat tergantung pada aspek politik dan masih dilihat sebagai sekadar alat politik. Indikasinya terlihat dari masih belum adanya perbaikan kualitas yang berkelanjutan dalam bidang pendidikan. Pernyataan itu disampaikan pengamat pendidikan sekaligus staf pengajar di Universitas Negeri Malang (UM) Dr. E Mulyasa, Senin (12/5), usai acara talk show Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran. Pengaruh dunia pendidikan pada aspek politik juga tampak dari berubah-ubahnya kebijakan pendidikan bersamaan dengan perubahan pemerintahan. Bahkan menurut pengamatan, upaya membuat undang-undang seperti Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak lepas dari persoalan politik di mana muncul kekuatan kontra yang besar di Jawa Timur.

Yang sering terjadi, ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti pejabat, ganti juga kebijakannya. Saya khawatir dalam penerapan konsep kurikulum berbasis kompetensi tahun depan juga akan bernasib sama seperti konsep lain seperti cara belajar siswa aktif, yang dalam hal ini sistem kurikulum pendidikan sudah ganti lagi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP).

Kalau kita melihat dalam skala global bahwa perbaikan mutu pendidikan di Indonesia masih terbatas pada proyek. Akibatnya, tidak ada kesinambungan

antara kebijakan yang satu dengan kebijakan lainnya. Persoalan itu diperparah lagi dengan belum ditanganinya masalah pendidikan oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Keadaan itu terjadi mulai dari tingkat atas, menengah, hingga paling bawah. Banyak proyek pendidikan tidak dimotori orang pendidikan sendiri. Sedangkan, di daerah-daerah tingkat dua banyak kepala dinas pendidikan dijabat orang yang ditentukan pemerintah daerah dan lebih berlatar politis.

Pemerintah juga dinilai masih sekadar memperhatikan aspek fisik dalam pembangunan dunia pendidikan di kota Malang. Dalam analisa, pemerintah kota Malang menganggap jika sudah membangun sarana dan prasarana fisik, mereka sudah merasa meningkatkan kualitas pendidikan. Seharusnya selain menata sarana dan prasarana, pemerintah juga harus mampu menata sumber daya manusia (SDM), terutama tenaga pendidik agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri," katanya. Peningkatan kualitas SDM itu tidak sekadar dilakukan secara ekonomi, seperti misalnya menaikkan gaji guru. Cara lain dapat ditempuh dengan meningkatkan kesadaran moral serta budaya Mutu dan kerja.

Dalam makna luas, pendidikan di kota Malang semestinya menjadi korpus teladan yang diletakkan di garda depan (mainstream paradigma), lagi-lagi yang mengatakan bahwa kota Malang adalah kota pendidikan, itulah cuplikan wawancara dengan Nur Wakhit, artinya bahwa mainstream paradigma menjadi semangat keberlangsungan bangsa, serta membangun generasi penerus bangsa yang santun, humanis dan unggul dalam keilmuan. Sejatinya, tiga pilar (tri pusat) filosofi inilah yang menjadi khitah (*mainstream epistemologis*) pendidikan nasional kita. Selain itu, dalam pasal 31 Amandemen UUD 1945 disebutkan

bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dasar hukum ini juga diperkuat dengan disyahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) tahun 2003 oleh presiden SBY. Baik UUD 1945 maupun UU SPN, sejatinya mengharamkan diskriminasi warga masyarakat dalam pendidikan. Kenyataannya pendidikan mulai keluar dari khittah tersebut. Selain sarat dengan anomali, pendidikan semakin jauh dari keberpihakan pada rakyat. Misalnya, kurikulum yang sering dimodifikasi (CBSA, Kurikulum 1994, KBK dan KTSP) tetapi tidak mencerdaskan siswa, biaya sekolah yang semakin menjulang, kesejahteraan dan wewenang guru yang terabaikan, persebaran sekolah dan guru yang tidak merata, bangunan-bangunan sekolah yang rusak serta persoalan lainnya. Belum lagi kekerasan yang membayangi dunia pendidikan. Istilah “disiplin” atau mendisiplinkan peserta didik, bak monster yang siap mencabut nyawa peserta didik. Tidak bisa dimungkiri, memupuk kedisiplinan seringkali menjadi tameng bagi guru dalam memberikan hukuman fisik pada murid-muridnya. Kasus kekerasan di IPDN belum lama ini, setidaknya menunjukkan pemahaman yang keliru tentang konsep disiplin dalam pendidikan.

Sejatinya, pendidikan merupakan proses humanisasi melalui pengangkatan manusia ke taraf insani. Oleh karenanya pembelajaran merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan (Imam Setyawan, 2007). Artinya, pendidikan adalah usaha membawa manusia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (*humannes*).

Proses belajar juga menuntut upaya memahami bagaimana individu berbeda dengan yang lain (*individual differences*). Di sisi lain, memahami bagaimana menjadi manusia seperti manusia lain (*persamaan dalam specieshood or humanness*). Proses pendidikan semestinya memberi tempat *inside-out* pemberdayaan diri berdasar paradigma, karakter, dan motif sendiri. Pendidikan yang baik, menurut Komisi D DPRD kota Malang dalam hal ini Hj. Ngatmiati adalah memberi paspor kehidupan bagi orang muda, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan nasib bangsanya.

Dari konsep itu, H. Syafraji mengatakan bahwa hakikat pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik lewat proses pendidikan agar mampu mengakses peran mereka di masa yang akan datang. Ini berarti, membekali peserta didik dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan sesuai tuntutan zaman menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu beranjak dari pesimisme prediksi bahwa seiring dengan meledaknya jumlah lulusan, mereka akan dihadapkan pada kesulitan mencari kesempatan kerja akibat tidak seimbangannya dengan lapangan kerja yang ada.

Untuk mencapai kompetensi tersebut, semestinya kurikulum berisi pembelajaran yang humanis dan menyediakan ruang bagi eksplorasi masalah kemanusiaan, dan membantu peserta didik menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Karena itu, perlu dikembangkan pembelajaran keahlian yang dibutuhkan (*life skill*) atau mungkin akan dibutuhkan guna menghadapi aneka masalah identitas, kekuasaan, dan keterhubungan. Selain itu kurikulum mestinya juga berisi

bagaimana menyelaraskan need for achievement, need for affiliation, dan need for power dalam pengembangan human relations.

Inilah yang disebut efek Sputnik, keterkejutan atas ketertinggalan yang membawa kepada kesadaran perlunya sebuah perubahan. Sejatinya bangsa kita sudah sering dikejutkan dengan penilaian yang buruk dari berbagai lembaga internasional. Salah satunya penilaian tentang rendahnya Mutu sumber daya manusia Indonesia yang menempatkan Indonesia di posisi amat rendah. Hanya saja, kita sering menutup telinga. Para Elit Politik PKB kota Malang sepertinya tak merasa perlu mengambil sikap dengan cara meluncurkan program terpadu guna mengatasi masalah pendidikan ini. Yang sudah terdengar, mereka sibuk berebut kursi di kabinet maupun di DPR/MPR. Paling banter, wacana menaikkan anggaran pendidikan hingga 25 persen dari RAPBN. Kenyataannya, tidak pernah terbukti. Sikap indiferentisme amat fenomenal di kalangan elite bangsa kita. Pola pendidikan kita semestinya membentuk komitmen, kejujuran dalam berpikir dan bertindak, memberikan live skill, menanamkan nilai-nilai humanisme pada peserta didiknya, mampu memangkas akar budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Kepemimpinan pendidikan yang diturunkan dari konsep filosofi pendidikan, harus dibangun dari visi dan misi yang jelas, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kesatuan antara komitmen awal (khitah), visi dan misi yang jelas, dan jaminan kulaitas layanan (quality assurance), bakal membawa roda manajemen pendidikan kita unggul dan terpercaya di mata dunia. Sudah saatnya segenap elemen bangsa berpikir bersama guna menaikkan Mutu pendidikan nasional kita.

Dari paparan analisa di atas yang menjadi latar belakang Elit Politik PKB kota Malang untuk memperjuangkan peningkatan Mutu Madrasah di madrasah adalah kepekaan sosial bagi Elit Politik memang diharapkan sebagai kepanjangan tangan dari rakyat, dan kepedulian serta amanah rakyat itulah yang menjadi cambuk bagi mereka untuk benar-benar memperjuangkan Mutu pendidikan khususnya Madrasah di kota Malang.

C. Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang

Salah satu peran dan strategi yang dikembangkan oleh Eli Politik PKB kota Malang yaitu dengan cara selalu memberikan pendampingan kepada setiap instansi pendidikan, sekalipun bukan atas nama partai politik, tetapi sekurang-kurangnya mereka memberikan apresiasi yang positif guna untuk mengembangkan Mutu pendidikan di kota Malang, sekalipun belum maksimal, tetapi lebih baik dari pada sama sekali, Fauzan mengatakan bahwa sebagai anggota dewan setidaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peka terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan.

Achmad Fauzan mengatakan bahwa konteks pendidikan saat ini masih didominasi suatu konstruksi pemikiran yang sangat pragmatis dari dunia pendidikan dimana orientasi kita untuk belajar ialah hanya untuk mencari sebuah pekerjaan yang layak tanpa memperhatikan makna pencerahan dari sebuah sistem pendidikan, mental-mental inlander ini pada dasarnya adalah sebuah konstruksi

besar dari sebuah sistem kapitalisme global yang masih terus lestari. Hingga saat ini, masih segar di ingatan kita bagaimana proses sistem pendidikan modern dibawa oleh kaum-kaum kolonial di tanah air kita dengan diawali oleh sebuah kebijakan politik etis yang pada akhirnya memunculkan kebijakan politik etis ini terlebih dahulu diawali oleh sebuah pergulatan dari kelompok-kelompok konservatif (terdiri dari kaum-kaum birokrat dan aristokrasi kerajaan Belanda yang berkultur sangat feodal) yang menghendaki untuk tetap memegang segala sesuatu kebijakan Negara tanpa campur tangan dari kelompok-kelompok moderat (dalam hal ini ialah kelompok-kelompok pengusaha) melawan kelompok-kelompok moderat (yang banyak dimotori oleh kaum-kaum pengusaha, termasuk Van Deventer sendiri yang kita kenal sebagai penggagas kebijakan politik etis ini).

Sekarang pun di tengah arus modernitas konstruksi dalam dunia pendidikan kita tidak berubah sedikitpun, bahwasanya sekolah ialah sebuah formalitas dan rutinitas yang harus kita penuhi untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, tanpa memperhatikan konsep-konsep pendidikan sebagai sebuah *enlightment*/pencerahan didalam kehidupan. Lebih celaka lagi pemerintah juga ikut-ikutan mengkonstruksi pola pikir yang sangat pragmatis didalam dunia pendidikan, konstruksi yang terbangun akhirnya bahwasanya pemerintah menjadi *supplier* tenaga kerja bagi kepentingan asing melalui berbagai macam perusahaan maupun instansi-instansi asing yang akan mulai memasuki Indonesia pada era pasar bebas nanti, maka untuk memberikan sari deskripsi awal dalam mengawali

masa reformasi ini khususnya di kota Malang peran serta wakil rakyat sangat diharapkan

Kalau kita melihat satu wujud realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khusus dunia pesantren yang merupakan bagian dalam institusi Madrasah. Pesantren memiliki peranan penting sebagai agen pencerdasan bangsa. Bahkan, ia pun menjadi guru pendidikan nasional. Institusi ini dianggap masyarakat luas sebagai sekolah alternatif. Mimpi-mimpi para orang tua dibuat nyata olehnya. Para orangtua menaruh perhatian besar kepada pesantren. Mereka berharap agar putra-putri mereka suatu saat nanti menjadi manusia yang berguna, sukses dunia akhirat. Namun, kepasrahan melanda orang tua murid yang tinggal di pelosok desa. Saat ini, institusi pendidikan banyak menyelenggarakan praktek komersialisasi. Hal ini disebabkan kurangnya pemerataan pendidikan serta pengagungan nilai-nilai materialisme yang lebih dominan ketimbang perbaikan sarana pendidikan.

Secara formal perjuangan dan peran Elit Politik khususnya dari fraksi PKB DPRD kota Malang, tidak hanya memperjuangkan pendidikan secara formal, tetapi mereka juga memperjuangkan non formal sebut saja pesantren. Meskipun telah banyak institusi pendidikan agama hadir di Indonesia, pesantren boleh jadi pilihan alternatif dari sekian banyak sekolah negeri dan swasta. Pada pelaksanaannya, guna mewujudkan pesantren sebagai kegiatan pendidikan yang ideal. Ia haruslah memiliki kriteria utama pada segi fasilitas seperti terdapatnya fasilitas belajar mengajar yang memadai. Menilik permasalahan ini, menjadi hal penting sebagai pilar utama keberhasilan para santriwan-santriwati di masa depan. Meskipun,

sistem pendidikan pesantren telah lama menerapkan sistem pendidikan konservatif. Namun, pesantren juga telah lama *survive* dalam sejarah perkembangan pendidikan Indonesia. Ia terbukti banyak berkontribusi memberi sumbangan bagi upaya mewujudkan idealisme sistem pendidikan nasional yang bukan sekadar meningkatkan kualitas SDM (*human resource*) pada aspek penguasaan sains dan teknologi, melainkan juga lebih berperan mencetak warga negara Indonesia yang mewakili ketakwaan kepada Tuhan YME, terutama untuk memupuk generasi bermoral baik.

PKB adalah lembaga institusi politik yang lahir dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang sangat berpegang teguh pada tradisi pesantren, yakni, menempatkan hubungan antara kyai dan santri sebagai faktor dominan, namun, selalu menjadi target politis dalam perolehan suara pada setiap *event* pemilu, seperti layaknya bunga menarik bagi kumbang, hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari faktor yang mendorong terciptanya politisasi warga *Nahdliyin*. Tradisi pesantren amat menekankan sikap keagamaan dogmatis, dalam artian, pengetahuan dan ajaran-ajaran agama harus mengikuti apa yang diwarisi kaum ulama terdahulu sebagai pewaris nabi yang tidak hanya sebagai pengikat emosi religiusitas kalangan bawah, tetapi juga terhadap kalangan menengah NU. Hal inilah yang mengawali penyerapan berbagai kebudayaan luar ke dalam dirinya. Tradisi kepatuhan yang hampir tanpa syarat ini sangat besar pengaruhnya terhadap sikap politis anggota-anggota NU. Namun, kekuasaan kyai bersifat kharismatik. Kekuasaan ini menolak unsur-unsur struktural lain selain patron kyai.

Pesantren identik dengan NU, bahkan NU pun lahir dari perkumpulan para kyai pemimpin pesantren yang menggagas terbentuknya wadah organisasi sosial keagamaan masyarakat berazaskan *Ahlusunnah Wal Jamaah*. Semenjak kelahirannya pada tahun 1926, ormas Islam terbesar itu mengadakan muktamar atau kongres yang diadakan tiap lima tahun sekali dengan tujuan untuk melahirkan pemimpin NU sebagai regenerasi organisasi sesuai instruksi yang diberikan kyai sepuh.

Kalau dunia pesantren itu didomisi oleh kaum *Nahdliyin*, maka peran Elit Politik kota Malang harus memprioritaskan pesantren sebagai basis untuk proses regenerasi anak bangsa, bukan hanya dari segi kesejahteraan para guru tetapi juga melihat pada pengembangan kreatifitas dan bakat siswa sehingga Mutu lulusan itu lebih berMutu dan ikut memberikan satu kontribusi besar bagi pengembangan dinamika pendidikan di Indonesia.

BAB V I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan diatas maka kita dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang yaitu :
 - a. Memfasitasi Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan dana renovasi lembaga pendidikan.
 - b. Mempejuangkan kesejahteraan guru di Madrasah
 - c. Pengadaan fasilitas pendukung
 - d. Memfasilitasi Madrasah dengan Diknas dan Depag kota Malang untuk mendapatkan media pembelajaran untuk meningkatkan Mutu Madrasah.
 - e. Memberikan beasiswa kepada anak didik, baik secara langsung maupun dari pos-pos dana yang ada dari Depag dan Diknas.
2. Yang melatarbelakngi Elit politik yang dalam hal ini anggota dewan dari unsur PKB sebagai instrumen dan penyambung lidah masyarakat, apapun yang menjadi keluhan di masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah dari sektor bidang akan mereka perjuangkan. Aspirasi rakyat, kepedulian dan keperihatinan merekalah yang meletar belakang mereka harus benar-benar berjuang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya dalam peningkatan Mutu Madrasah di kota Malang. Sekaligus teropsesi oleh jargon Malang sebagai kota pendidikan *go* internasional.

3. Peran Elit Politik PKB di DPRD dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang. Secara umum bahwa peran Elit politik PKB yang saat ini yang duduk di kursi legislatif (DPRD) tidak secara langsung memberikan satu kontribusi secara *face to face*, apalagi harus membawa kendaraan organisasi, mereka hanya memperjuangkan kalau instansi pendidikan memberikan informasi dan keluhan terkait dengan pengembangan Mutu Madrasah. Para Elit Politik PKB kota Malang akan memperjuangkan dengan semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya yang menjadi penentu dalam hal kebijakan tersebut semuanya tergantung pada sidang dewan.

B. Saran-saran

1. Sehausnya anggota legislatif (Elit Politik) harus lebih peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya terkait dengan peningkatan mutu pendidikan kota Malang dan seyogyanya apapun yang menjadi keluhan di masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah dari sektor bidang mereka perjuangkan. Aspirasi rakyat, kepedulian dan keperihatinan merekalah yang meletar belakang mereka harus benar-benar berjuang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya dalam peningkatan Mutu Madrasah di kota Malang. Sekaligus teropsesi oleh jargon Malang sebagai kota pendidikan *go internasional*.
2. Setidaknya Elit Politik memberikan akses berupa peningkatan mutu dengan kata lain memberikan pelatihan-pelatihan atau MoU dengan instansi

pendidikan dengan ranah-ranah pendidikan secara langsung dengan mendatangkan pakar, sehingga mutu pendidikan benar-benar berkualitas.

3. Elit Politik (DPRD) bagi dari pemerintah. Maka, pemerintah kota Malang dengan *iconnya* sebagai pendidikan yang *go* internasional, setidaknya memberikan aspirasi inovatif terhadap mutu pendidikan di kota Malang dengan melihat secara langsung apa yang menjadi keluhan para pendidik, terutama Departemen Pendidikan dan Departemen Agama.
4. Sebagai seorang peneliti yang ideal memohon dengan sangat kepada para instansi sebagai obyek penelitian setidaknya memberikan kemudahan untuk mengakses semua data yang terkait dengan kebutuhan yang diteliti sebagai penyempurna dan lebih aktualnya hasil penemuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. "Potret Pendidikan Anak-anak Pengungsi Sebuah Studi di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur" dalam *Abd. Gafur. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Sains dan Teknologi Vol. 6. No. 2.* (Malang: UIN Malang.)
- Artikel Pendidikan. *Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi.* <http://Sofian. Staff. UGM.ac.id>.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek.* Jakarta. PT. Rineka Cipta. Cet XII.
- Artikel Pendidikan. *Konsep Dasar MPMBM.* www.dikdasmen.depdiknas.go.id.
- Badiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Batubara, H, Muhyi, M. Sc. 2004. *Sosiologi Pendidikan.* Jakarta. PT. Ciputat Press.
- Darajat, Zakiah. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta. Bumi Aksara.
- F. Isjwara S. H L. L. M. 1999. *Pengantar Ilmu Politik.* Putra Bardin.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research II.* Yogyakarta. Andi.
- Ilmu Pendidikan Islam.* 1983. Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Mubarak, Zulfi. 2006. *Konspirasi Politik elit Tradisional di Era Reformasi.* Yogyakarta. Aditya Media.
- Mallaranggeng, Andi, A. 1999. *UU Politik Buah Reformasi Setengah Hati.* Jakarta. Sembrani Aksara Nusantara.
- Muhaimin, H. MA. *Nuansa Baru Pendidikan Islam.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J, Lexy. 2002. *Metododologi Penelitian Kualitatif.* Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Marzuki. 1989. *Metodologi Riset.* Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UII.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian.* Jakarta. Galia Indonesia, Cet. III.

Partanto, A, Pius dan Al Barry, Dahlan, M. 2002. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Arkol.

Peningkatan Kualitas Mutu Pendidika, <http://Darmi.Blogspot.Com/20/07/07>



BUKTI KONSULTASI

Dosen Pembimbing : Muhammad Walid, MA.
 NIP. : 150310896
 Nama Mahasiswa : Ibrahim Isa
 NIM : 03140023
 Fakultas : Tarbiyah
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam
 Judul Skripsi : Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Malang Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	15 November 2007	Konsultasi Proposal	
2	20 November 2007	ACC Proposal	
3	27 November 2007	Konsultasi Bab I	
4	1 Desember 2007	ACC Bab I	
5	5 Desember 2007	Konsultasi Bab II	
6	27 Desember 2007	ACC Bab II	
7	1 Januari 2008	Konsultasi Bab III	
8	5 Januari 2008	ACC Bab III	
9	10 Januari 2008	Konsultasi Bab IV	
10	17 Januari 2008	ACC Bab IV	
11	7 Februari 2008	Konsultasi Bab V	
12	27 Februari 2008	ACC Bab V	
13	29 Februari 2008	Bab VI dan ACC	

Malang, 7 April 2008
 Mengetahui,
 Dekan Fakultas Tarbiyah

Prof. Dr. H.M. Djunaidi Ghony
NIP. 150042031

PEDOMAN INTERVIEW

A. Untuk Elit Politik DPC PKB kota Malang:

1. Bagaimana bapak/ibu melihat perkembangan pendidikan di kota Malang ?
2. Bagaimana mutu pendidikan di kota Malang, khusus pendidikan Islam ?
3. Apakah ada respon pemerintah kota Malang dalam memajukan sistem pendidikan Islam di kota Malang ?
4. Apa tanggapan Bapak/Ibu dengan pergantian kurikulum pendidikan dari KBK menjadi KTSP ?
5. Apa peduli Bapak/Ibu sebagai wakil rakyat dan elit politik khususnya dari fraksi PKB terhadap mutu pendidikan agama Islam di kota Malang?
6. Langkah-Langkah apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk wujudkan mutu pendidikan agama Islam di kota Malang?
7. Apakah PKB sebagai institusi politik mempunyai program khusus untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Malang khususnya pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren?
8. Strategi dan peran apa yang Bapak/ibu lakukan dalam wujudkan peningkatan mutu pendidikan agama Islam di madrasah kota Malang ?
9. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu sebagai wakil rakyat untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah kota Malang?
10. Apa saran Bapak/Ibu terkait dengan jargon kota Malang sebagai kota pendidikan *go internasional* ?

B. Untuk Pengecekan Kebasahan Data :

1. Apakah Madrasah Sunan Kalijaga Malang mendapat insentif untuk guru dari Depag atau Diknas?
2. Berapa insentif yang di berikan untuk guru perbulan?
3. Apakah guru merasa cukup atau sejahtera dengan insentif Rp. 200. 000 perbulan?
4. Apakah Madrasah Sunan Kalijaga Malang pernah mendapat bantuan dari Depag atau Diknas?
5. Berupa apa bantuan yang di berikan oleh Depag atau Diknas?
6. Apakah Madrasah Sunan Kalijaga perna di kunjungi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi D atau yang lain yang berasal dari PKB?
7. Kira-kira apa yang bapak rasakan terhadap Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa?
8. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh para Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di kota Malang khususnya di Madrasah Sunan Kalijaga Malang?
9. Bagaimana peran elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang secara nyata bapak rasakan? Kemungkinan dengan adanya bantuan itu mereka yang memperjuangkan sehingga bantuan seperti yang di atas itu ada.